



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127/PMK.02/2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; dan
 - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sub keluaran (*sub output*) Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pemeriksaan, dan Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3); dan

- b. sub keluaran (*sub output*) Penelitian.

Pasal 3

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2020;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2021; dan/atau
- d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran sub keluaran (*sub output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tatacara revisi anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran (*sub output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*;
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran

2020 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.

- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 988

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 127 /PMK.02/2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/SELURUH
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEMERIKSAAN, DAN PERUMUSAN RSNIS
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)			
	a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	51.700.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	410.200.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	758.300.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon II dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	1.493.100.000	
	5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon II dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	1.725.100.000	
	b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	212.000.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di bawah 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	360.100.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	545.100.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	619.100.000	
2	Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK Dokumen LAKIN)			
	a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	17.300.000	
	2) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	135.900.000	
	3) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	252.800.000	
	4) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	497.800.000	
	5) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal diatas 34 satker	1 Dokumen	575.100.000	
	b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L			
	1) Dokumen LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	70.600.000	
	2) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	120.000.000	
	3) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	181.700.000	
	4) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal diatas 10 unit	1 Dokumen	206.300.000	
3	Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)			
	a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi	1 Per Peserta	30.261.000	
	b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	22.125.000	
	c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	20.230.000	
4	Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)			
	a. Diklat Prajabatan Golongan I dan II	1 Per Peserta	9.296.000	
	b. Diklat Prajabatan Golongan III	1 Per Peserta	9.296.000	
	c. Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Per Peserta	2.242.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)			
	a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
	1) Aceh	1 LHA	27.300.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	25.800.000	
	3) Riau	1 LHA	25.500.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	24.900.000	
	5) Jambi	1 LHA	21.200.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	24.200.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	23.700.000	
	8) Lampung	1 LHA	17.700.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	22.000.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	21.300.000	
	11) Banten	1 LHA	15.300.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	14.400.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	2.700.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	19.600.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	24.000.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	23.900.000	
	17) Bali	1 LHA	28.500.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	25.400.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	29.800.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	22.400.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	23.700.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	23.100.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	30.300.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	28.200.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	31.400.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	31.000.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	31.500.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	27.300.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	33.100.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	29.000.000	
	31) Maluku	1 LHA	37.100.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	34.600.000	
	33) Papua	1 LHA	45.400.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	48.500.000	
	b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota			
	1) Aceh	1 LHA	58.300.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	56.800.000	
	3) Riau	1 LHA	56.500.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	55.800.000	
	5) Jambi	1 LHA	52.200.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	55.200.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	54.700.000	
	8) Lampung	1 LHA	48.700.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	53.000.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	52.200.000	
	11) Banten	1 LHA	46.200.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	45.300.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	50.600.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	54.900.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	54.900.000	
	17) Bali	1 LHA	59.500.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	56.300.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	60.800.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	53.300.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	54.600.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	54.100.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	61.300.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	59.200.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	62.400.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	62.000.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	62.500.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	58.300.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	64.100.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	60.000.000	
	31) Maluku	1 LHA	68.000.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	65.500.000	
	33) Papua	1 LHA	76.400.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	79.500.000	
	c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi			
	1) Aceh	1 LHA	125.800.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	121.000.000	
	3) Riau	1 LHA	142.700.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	137.200.000	
	5) Jambi	1 LHA	109.400.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	126.300.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	139.900.000	
	8) Lampung	1 LHA	93.600.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	115.700.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	119.500.000	
	11) Banten	1 LHA	109.800.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	101.300.000	
	13) Jawa Tengah	1 LHA	103.200.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	14) D.I. Yogyakarta	1 LHA	141.900.000	
	15) Jawa Timur	1 LHA	128.700.000	
	16) Bali	1 LHA	161.600.000	
	17) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	128.200.000	
	18) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.900.000	
	19) Kalimantan Barat	1 LHA	114.100.000	
	20) Kalimantan Tengah	1 LHA	124.100.000	
	21) Kalimantan Selatan	1 LHA	116.000.000	
	22) Kalimantan Timur	1 LHA	154.900.000	
	23) Kalimantan Utara	1 LHA	149.900.000	
	24) Sulawesi Utara	1 LHA	152.100.000	
	25) Gorontalo	1 LHA	149.400.000	
	26) Sulawesi Barat	1 LHA	149.400.000	
	27) Sulawesi Selatan	1 LHA	138.300.000	
	28) Sulawesi Tengah	1 LHA	167.400.000	
	29) Sulawesi Tenggara	1 LHA	147.000.000	
	30) Maluku	1 LHA	157.900.000	
	31) Maluku Utara	1 LHA	142.700.000	
	32) Papua	1 LHA	203.000.000	
	33) Papua Barat	1 LHA	187.200.000	
6	Standar Biaya Keluaran Dokumen RSNI3 (SBK Dokumen RSNI3)			
	a. SBK Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i>			
	1) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	99.060.000	
	2) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	99.060.000	
	3) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	99.060.000	
	4) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	99.060.000	
	5) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	99.060.000	
	6) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	104.135.000	
	7) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	104.135.000	
	8) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	104.135.000	
	9) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	104.135.000	
	10) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	104.135.000	
	b. SBK Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	265.340.000	
	2) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	360.840.000	
	3) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	528.880.000	
	4) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	626.780.000	
	5) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	735.550.000	
	6) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	850.670.000	
	7) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.012.590.000	
	8) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.112.790.000	
	9) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.285.430.000	
	10) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.385.630.000	
	c. SBK Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri			
	1) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	388.825.000	
	2) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	488.295.000	
	3) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	649.235.000	
	4) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	753.435.000	
	5) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	841.935.000	
	6) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	958.625.000	
	7) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.100.275.000	
	8) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.194.260.000	
	9) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.344.230.000	
	10) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.432.730.000	
	d. SBK Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	390.340.000	
	2) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	485.840.000	
	3) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	653.880.000	
	4) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	751.780.000	
	5) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	860.550.000	
	6) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	975.670.000	
	7) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.137.590.000	
	8) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.237.790.000	
	9) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.410.430.000	
	10) Dokumen RSNI3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.510.630.000	

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Standar Biaya Keluaran Riset Pembinaan/Kapasitas (SBK Riset Pembinaan/Kapasitas)	1 Laporan	20.000.000	
2	Standar Biaya Keluaran Riset Dasar (SBK Riset Dasar)			
	a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	151.320.000	
	b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Laporan	135.670.000	
	c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	307.000.000	
	d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	168.400.000	
	e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	90.000.000	
	f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)	1 Laporan	235.000.000	
	g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	179.960.000	
	h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.050.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	123.800.000	
	j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	120.000.000	
	k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	230.000.000	
	l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	290.000.000	
	m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	665.000.000	
	o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
	p. SBK Riset Dasar Teoritis	1 Laporan	40.546.200	
3	Standar Biaya Keluaran Riset Terapan (SBK Riset Terapan)			
	a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	216.000.000	
	b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	221.900.000	
	c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	448.800.000	
	d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	143.200.000	
	e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	208.400.000	
	f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	400.200.000	
	g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	370.800.000	
	h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	209.000.000	
	i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	327.500.000	
	j. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	150.000.000	
	k. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	165.000.000	
	l. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	290.000.000	
	m. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	n. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	665.000.000	
	o. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
4	Standar Biaya Keluaran Riset Pengembangan (SBK Riset Pengembangan)			
	a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	568.100.000	
	b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	1.124.800.000	
	c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.048.100.000	
	d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	349.600.000	
	e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	402.500.000	
	f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	559.600.000	
	g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	724.038.000	
	h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	301.500.000	
	i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.083.700.000	
	j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	515.000.000	
5	Standar Biaya Keluaran Kajian Aktual Strategis (SBK Kajian Aktual Strategis)	1 Naskah Kebijakan	60.000.000	

PENJELASAN

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) YANG BERLAKU UNTUK
BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

**A. SUB KELUARAN (*SUB OUTPUT*) PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PEMERIKSAAN, DAN PERUMUSAN RSNIS**

**1. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)**

SBK Dokumen RKA-K/L merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat

SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat merupakan SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan oleh Satker Unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal Satker Eselon I/Setingkat secara organisasi membawahi Satker Eselon II/Setingkat (termasuk Eselon III/Setingkat dan/atau Eselon IV/Setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi Eselon I/Setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh Satker dilingkup Eselon I/Setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.

b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L

SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L merupakan SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh Eselon I/Setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.

**2. Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK
Dokumen LAKIN)**

SBK Dokumen LAKIN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat
SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat merupakan SBK Dokumen LAKIN yang digunakan oleh Satker Unit organisasi lini K/L Setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat.

Dalam hal Satker Eselon I/Setingkat secara organisasi membawahi Satker Eselon II/Setingkat (termasuk Eselon III/Setingkat dan/atau Eselon IV/Setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi Eselon I/Setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh Satker dilingkup Eselon I/Setingkat tersebut.

- b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L
SBK Dokumen LAKIN untuk K/L merupakan SBK Dokumen LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

3. Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)

SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- a. biaya perjalanan dinas peserta *on campus*.
- b. biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPH Pasal 20).

4. Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)

SBK Diklat Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I/II, III, dan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- a. biaya perjalanan dinas peserta *on campus*.
- b. biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan

proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPH Pasal 20).

5. Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)

SBK Audit Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama
SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama merupakan SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi Satker APIP.
- b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota
SBK Audit Kinerja Dalam Kota merupakan SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di dalam kota yang sama dengan lokasi Satker APIP.
- c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi
SBK Audit Kinerja Luar Provinsi merupakan SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berbeda provinsi dengan lokasi Satker APIP.

6. Standar Biaya Keluaran Dokumen RSNI3 (SBK Dokumen RSNI3)

SBK Dokumen RSNI3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen RSNI yang dihasilkan pada tahap pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat K/L.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- b. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan adopsi modifikasi metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- d. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran (*output*) akhir berupa jumlah halaman dokumen RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

1. Standar Biaya Keluaran Pembinaan/Kapasitas (SBK Riset Pembinaan/Kapasitas)

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final.

Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

- b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Standar Biaya Keluaran Riset Dasar (SBK Riset Dasar)

SBK Riset Dasar merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan (konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan).

- b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus EBT merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk

kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju
SBK Riset Dasar Bidang Material Maju merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan
SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.
- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

- l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.
- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.
- p. SBK Riset Dasar Teoritis
SBK Riset Dasar Teoritis merupakan kelompok ini melingkup riset-riset dibidang keilmuan dasar yang tidak ada dalam kelompok bidang fokus 10 (sepuluh) lainnya, diantaranya matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, statistika dan lainnya. Riset ini ditujukan untuk mencari ilmu pengetahuan baru, pencarian yang bersistem untuk menemukan hal yang belum diketahui, yang belum dapat ditentukan implementasinya. Penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini merupakan dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian teoritis dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung bidang fokus lainnya. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

3. Standar Biaya Keluaran Riset Terapan (SBK Riset Terapan)

SBK Riset Terapan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi

komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

- d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
- f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.
- g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif pendukung industri.
- h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan

maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- j. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.

- k. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri.

- l. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.

- m. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- n. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
- SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian

bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

4. Standar Biaya Keluaran Riset Pengembangan (SBK Riset Pengembangan)

SBK Riset Pengembangan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI),

perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi, dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

- c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

- d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

- e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan

teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antarmedia.

- f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

- h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, dan jasa-jasa kelautan.

- i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan/atau manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan merupakan SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

5. Standar Biaya Keluaran Aktual Strategis (SBK Kajian Aktual Strategis)

SBK Kajian Aktual Strategis merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Catatan Umum:

1. Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, TIK, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.

2. Terhadap SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial, Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. buku nasional;
 - f. buku internasional;
 - g. naskah kebijakan;
 - h. artikel populer di media cetak;
 - i. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks; dan/atau
 - l. karya seni (tari, patung, lukisan, puisi, musik).
3. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru;
 - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - p. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - q. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.

4. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
5. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru; dan/atau
 - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional.
6. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;

- d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
 - t. paten sederhana terdaftar;
 - u. merek dagang terdaftar;
 - v. desain industri terdaftar;
 - w. rahasia dagang terdaftar;
 - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - z. indikasi geografis terdaftar.
7. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;

- j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks;
 - t. paten sederhana terdaftar;
 - u. merek dagang terdaftar;
 - v. desain industri terdaftar;
 - w. rahasia dagang terdaftar;
 - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - z. indikasi geografis terdaftar.
8. Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;

- o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - s. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
 - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
 - v. prototipe laik *preklinis*;
 - w. herbal terstandar;
 - x. paten sederhana terdaftar;
 - y. merek dagang terdaftar;
 - z. desain industri terdaftar;
 - aa. rahasia dagang terdaftar;
 - bb. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - cc. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
 - dd. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
 - ee. fitofarmaka.
9. Terhadap SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. paten sederhana terdaftar;
 - l. merek dagang terdaftar;
 - m. desain industri terdaftar;
 - n. rahasia dagang terdaftar;

- o. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - p. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - q. indikasi geografis terdaftar.
10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal Internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
 - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*;
 - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*;
 - n. paten sederhana terdaftar;
 - o. merek dagang terdaftar;
 - p. desain industri terdaftar;
 - q. rahasia dagang terdaftar;
 - r. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - s. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
 - t. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
 - u. fitofarmaka.
11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal internasional	15.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
4	Publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi	50.000.000
5	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional	2.000.000
6	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional	5.000.000
7	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	10.000.000
8	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
9	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
10	Paten terdaftar	75.000.000
11	Paten <i>granted</i>	80.000.000
12	Paten terpakai di industri	90.000.000
13	Paten Sederhana terdaftar	25.000.000
14	Merek Dagang terdaftar	75.000.000
15	Desain Industri terdaftar	75.000.000
16	Rahasia Dagang terdaftar	75.000.000
17	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar	75.000.000
18	Perlindungan Varietas Tanaman terdaftar	75.000.000
19	Indikasi geografis terdaftar	75.000.000
20	Buku nasional	30.000.000
21	Buku internasional	65.000.000
22	Karya Seni (Tari, Patung, Lukisan, Puisi, Musik)	50.000.000
23	Naskah kebijakan	25.000.000
24	Artikel populer di media cetak	2.000.000
25	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
26	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
27	Material untuk produk biologi	50.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
28	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
29	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
30	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
31	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
32	Temuan senyawa/ <i>sequence</i> DNA penambahan	100.000.000
33	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
34	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
35	Galur perbaikan	150.000.000
36	PVT/Varietas terdaftar	1.000.000.000
37	PVT/Varietas terdaftar ornamental	100.000.000
38	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
39	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
40	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
41	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
42	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
43	Jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
44	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
45	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
46	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
47	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i> ;	1.000.000.000
48	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i> ;	6.000.000.000
49	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i> .	10.000.000.000
50	Herbal terstandar	200.000.000
51	Fitofarmaka	200.000.000
52	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 /PMK.02/2019
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK SATU
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERTENTU

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 LHP LK Pemerintah Pusat	1 LHP	13.328.635.000	
	2 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik AKN V	10 LHP	156.770.000	
	3 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Aceh	229 LHP	554.980.000	
	4 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	324 LHP	822.024.000	
	5 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Riau	138 LHP	348.935.000	
	6 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	71 LHP	203.412.000	
	7 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Jambi	125 LHP	283.772.000	
	8 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	192 LHP	497.268.000	
	9 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	191 LHP	487.982.000	
	10 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Lampung	158 LHP	382.984.000	
	11 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Bengkulu	110 LHP	268.158.000	
	12 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73 LHP	190.948.000	
	13 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Banten	95 LHP	242.069.000	
	14 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Jawa Barat	268 LHP	686.852.000	
	15 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	9 LHP	13.229.000	
	16 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	330 LHP	823.704.000	
	17 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	54 LHP	162.480.000	
	18 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Jawa Timur	353 LHP	997.562.000	
	19 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Bali	68 LHP	285.852.000	
	20 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	121 LHP	293.029.000	
	21 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	29 LHP	495.826.000	
	22 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	158 LHP	358.172.000	
	23 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	137 LHP	365.573.000	
	24 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	142 LHP	324.700.000	
	25 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	72 LHP	509.418.000	
	26 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	103 LHP	401.084.000	
	27 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Gorontalo	58 LHP	192.799.000	
	28 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	78 LHP	196.923.000	
	29 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	253 LHP	642.882.000	
	30 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	118 LHP	397.048.000	
	31 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	166 LHP	483.592.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
32	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku	122 LHP	392.168.000	
33	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku Utara	110 LHP	333.553.000	
34	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Papua	29 LHP	1.174.520.000	
35	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Papua Barat	70 LHP	439.838.000	
36	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	58 LHP	185.596.000	
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
Laporan Hasil Reviu Kelembagaan				
37	Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Kelembagaan	6 Laporan	3.433.401.000	
38	Laporan Reviu atas Konsep LK BPK	4 Laporan	3.623.402.000	
39	Laporan Reviu atas Konsep RKA BPK	1 Laporan	232.706.000	
Laporan Hasil Reviu Pemeriksaan				
40	Laporan Hasil Penilaian Kualitas Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	2.170.698.000	
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)				
41	LHP AKN I	1 LHP	939.305.000	
42	LHP AKN II	1 LHP	1.309.868.000	
43	LHP AKN III	1 LHP	505.630.000	
44	LHP AKN IV	1 LHP	1.766.015.000	
45	LHP AKN V	1 LHP	1.154.938.000	
46	LHP AKN VI	1 LHP	1.696.078.000	
47	LHP AKN VII	1 LHP	1.209.874.000	
48	LHP BPK Perwakilan Prov. Aceh	1 LHP	280.037.000	
49	LHP BPK Perwakilan Prov. Sumut	1 LHP	267.818.000	
50	LHP BPK Perwakilan Prov. Riau	1 LHP	358.826.000	
51	LHP BPK Perwakilan Prov. Kepri	1 LHP	333.917.000	
52	LHP BPK Perwakilan Prov. Jambi	1 LHP	320.414.000	
53	LHP BPK Perwakilan Prov. Sumbar	1 LHP	290.859.000	
54	LHP BPK Perwakilan Prov. Sumsel	1 LHP	365.682.000	
55	LHP BPK Perwakilan Prov. Lampung	1 LHP	271.636.000	
56	LHP BPK Perwakilan Prov. Bengkulu	1 LHP	291.137.000	
57	LHP BPK Perwakilan Prov. Kepulauan Babel	1 LHP	345.583.000	
58	LHP BPK Perwakilan Prov. Banten	1 LHP	339.746.000	
59	LHP BPK Perwakilan Prov. Jabar	1 LHP	325.283.000	
60	LHP BPK Perwakilan Prov. DKI Jakarta	1 LHP	728.754.000	
61	LHP BPK Perwakilan Prov. Jateng	1 LHP	304.471.000	
62	LHP BPK Perwakilan Prov. DI Yogyakarta	1 LHP	366.096.000	
63	LHP BPK Perwakilan Prov. Jatim	1 LHP	352.044.000	
64	LHP BPK Perwakilan Prov. Bali	1 LHP	392.571.000	
65	LHP BPK Perwakilan Prov. NTB	1 LHP	296.817.000	
66	LHP BPK Perwakilan Prov. NTT	1 LHP	283.134.000	
67	LHP BPK Perwakilan Prov. Kalbar	1 LHP	302.620.000	
68	LHP BPK Perwakilan Prov. Kalteng	1 LHP	298.248.000	
69	LHP BPK Perwakilan Prov. Kalsel	1 LHP	281.622.000	
70	LHP BPK Perwakilan Prov. Kaltim	1 LHP	333.638.000	
71	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulut	1 LHP	336.756.000	
72	LHP BPK Perwakilan Prov. Gorontalo	1 LHP	322.598.000	
73	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulbar	1 LHP	299.195.000	
74	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulsel	1 LHP	309.115.000	
75	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulteng	1 LHP	374.556.000	
76	LHP BPK Perwakilan Prov. Sultra	1 LHP	301.717.000	
77	LHP BPK Perwakilan Prov. Maluku	1 LHP	347.837.000	
78	LHP BPK Perwakilan Prov. Maluku Utara	1 LHP	297.292.000	
79	LHP BPK Perwakilan Prov. Papua	1 LHP	454.571.000	
80	LHP BPK Perwakilan Prov. Papua Barat	1 LHP	357.418.000	
81	LHP BPK Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	325.487.000	
82	LHP Interim/Pendahuluan AKN I	1 Laporan	321.602.000	
83	LHP Interim/Pendahuluan AKN II	1 Laporan	470.417.000	
84	LHP Interim/Pendahuluan AKN III	1 Laporan	232.313.000	
85	LHP Interim/Pendahuluan AKN IV	1 Laporan	768.047.000	
86	LHP Interim/Pendahuluan AKN V	1 Laporan	470.417.000	
87	LHP Interim/Pendahuluan AKN VI	1 Laporan	768.047.000	
88	LHP Interim/Pendahuluan AKN VII	1 Laporan	470.417.000	
89	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 Laporan	110.686.000	
90	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	164.831.000	
91	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 Laporan	251.001.000	
92	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	230.632.000	
93	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 Laporan	207.888.000	
94	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	117.100.000	
95	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	254.603.000	
96	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 Laporan	171.693.000	
97	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 Laporan	107.868.000	
98	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	226.709.000	
99	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 Laporan	230.127.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	213.505.000	
101	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	404.024.000	
102	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	183.862.000	
103	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Laporan	253.981.000	
104	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	220.832.000	
105	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 Laporan	267.332.000	
106	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi NTB	1 Laporan	116.285.000	
107	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi NTT	1 Laporan	106.694.000	
108	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	197.127.000	
109	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	185.655.000	
110	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	108.869.000	
111	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	140.108.000	
112	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	230.743.000	
113	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 Laporan	121.606.000	
114	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	117.954.000	
115	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	108.625.000	
116	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	261.522.000	
117	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	120.362.000	
118	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 Laporan	239.067.000	
119	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	123.023.000	
120	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 Laporan	315.406.000	
121	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 Laporan	139.158.000	
122	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	129.556.000	
123	LHP Auditorat Utama Investigasi	1 LHP	786.269.000	
124	Laporan Penelaahan Informasi Awal	1 Laporan	67.983.000	
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)				
Penilaian Kompetensi				
125	Penilaian Kompetensi Pemeriksa	1 Laporan	167.273.000	
LHP Tematik				
126	LHP Tematik AKN I	1 LHP	8.837.380.000	
127	LHP Tematik AKN II	1 LHP	8.837.380.000	
128	LHP Tematik AKN III	1 LHP	8.837.380.000	
129	LH Tematik AKN IV	1 LHP	8.837.380.000	
130	LHP Tematik AKN V	1 LHP	8.837.380.000	
131	LHP Tematik AKN VI	1 LHP	8.837.380.000	
132	LHP Tematik AKN VII	1 LHP	8.837.380.000	
Laporan Hasil Evaluasi KAP				
133	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN I	1 Laporan	210.775.000	
134	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN II	1 Laporan	210.775.000	
135	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN III	1 Laporan	210.775.000	
136	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN IV	1 Laporan	210.775.000	
137	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN V	1 Laporan	210.775.000	
138	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN VI	1 Laporan	210.775.000	
139	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN VII	1 Laporan	210.775.000	
Laporan Pemantauan AKN I				
140	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
141	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	44.246.000	
Laporan Pemantauan AKN II				
142	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
143	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	44.246.000	
Laporan Pemantauan AKN III				
144	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
145	Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	44.246.000	
Laporan Pemantauan AKN IV				
146	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
147	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	44.246.000	
Laporan Pemantauan AKN V				
148	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
149	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	44.246.000	
Laporan Pemantauan AKN VI				
150	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
151	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	44.246.000	
Laporan Pemantauan AKN VII				
152	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	61.181.000	
153	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	44.246.000	
Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Aceh				
154	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.001.000	
155	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	20.770.000	
Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sumut				
156	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.089.000	
157	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.886.000	
Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Riau				
158	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.747.000	
159	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	24.265.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kepri			
160	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.207.000	
161	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	23.275.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jambi			
162	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.825.000	
163	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.190.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sumbar			
164	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.675.000	
165	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	22.585.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sumsel			
166	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.391.000	
167	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	24.565.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Lampung			
168	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.179.000	
169	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.601.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Bengkulu			
170	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.253.000	
171	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	22.012.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kepulauan Babel			
172	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.741.000	
173	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	21.736.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Banten			
174	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	24.387.000	
175	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	26.341.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jabar			
176	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.031.000	
177	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	22.219.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. DKI Jakarta			
178	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	73.983.000	
179	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	61.833.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jateng			
180	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	18.757.000	
181	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	20.788.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. DI Yogyakarta			
182	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.177.000	
183	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	25.048.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jatim			
184	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.745.000	
185	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	23.374.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Bali			
186	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	22.845.000	
187	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	26.920.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. NTB			
188	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.331.000	
189	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	24.049.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. NTT			
190	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.141.000	
191	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.304.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kalbar			
192	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.201.000	
193	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	21.995.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kalteng			
194	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.787.000	
195	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	22.267.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kalsel			
196	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.913.000	
197	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	20.782.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kaltim			
198	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	27.385.000	
199	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.407.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sulut			
200	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	22.991.000	
201	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	23.371.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Gorontalo			
202	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.919.000	
203	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.615.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sulbar			
204	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	22.947.000	
205	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	25.417.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sulse			
206	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	22.413.000	
207	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	24.004.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sulteng			
208	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.693.000	
209	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	26.398.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sultra			
210	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.641.000	
211	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	24.670.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Maluku			
212	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	27.993.000	
213	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	30.064.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Maluku Utara			
214	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	27.083.000	
215	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	27.697.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Papua			
216	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	32.561.000	
217	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	37.288.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Papua Barat			
218	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	29.011.000	
219	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	31.417.000	
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara			
220	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	24.121.000	
221	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Atau Daerah	1 Laporan	28.618.000	
	Laporan Evaluasi Pengawasan			
222	Laporan Pemberkasan	1 Laporan	135.780.000	
	Laporan Hasil Reviu Kelembagaan			
223	LHPI Inspektorat Utama	1 Laporan	272.951.000	
	Laporan Hasil Reviu Pemeriksaan			
224	Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Pemeriksaan	1 Laporan	247.400.000	
	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemeriksaan Keuangan Negara			
225	Diklat Teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara	1 Angkatan	114.560.000	
226	Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	114.560.000	
227	Diklat Sertifikasi Akuntan Publik	1 Angkatan	128.352.000	
228	Diklat Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia	1 Angkatan	227.190.000	
229	Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa	1 Angkatan	599.662.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	Kepaniteraan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Putusan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali			
	1 Putusan Perkara Pidana	1 Perkara	1.686.364	
	2 Putusan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	970.114	
	3 Putusan Perkara PHI (yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah)	1 Perkara	833.630	
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu			
	1 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	610.000	
	2 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	977.000	
	3 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	440.000	
	4 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Maluku Utara	1 perkara	936.000	
	5 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	1.553.000	
	6 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 perkara	571.000	
	7 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 perkara	897.000	
	8 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 perkara	402.000	
	9 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Banten	1 perkara	907.000	
	10 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 perkara	1.533.000	
	11 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	571.000	
	12 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.038.000	
	13 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	509.000	
	14 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.038.000	
	15 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.505.000	
	16 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 perkara	543.000	
	17 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 perkara	877.000	
	18 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	422.000	
	19 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	907.000	
	20 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	1.517.000	
	21 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	557.000	
	22 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	900.000	
	23 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	481.000	
	24 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	860.000	
	25 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	1.495.000	
	26 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	592.000	
	27 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	750.000	
	28 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	445.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	29 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	681.000	
	30 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	1.349.000	
	31 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 perkara	556.000	
	32 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	897.000	
	33 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	427.000	
	34 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	889.000	
	35 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	1.349.000	
	36 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	556.000	
	37 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	897.000	
	38 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	401.000	
	39 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Yogyakarta	1 Perkara	889.000	
	40 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	1.349.000	
	41 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	557.000	
	42 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	897.000	
	43 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	399.000	
	44 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	874.000	
	45 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	1.349.000	
	46 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	571.000	
	47 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	900.000	
	48 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	470.000	
	49 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	853.000	
	50 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	1.349.000	
	51 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	572.000	
	52 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.040.000	
	53 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	487.000	
	54 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.027.000	
	55 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.367.000	
	56 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	572.000	
	57 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.040.000	
	58 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	487.000	
	59 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.027.000	
	60 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.407.000	
	61 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	572.000	
	62 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	1.040.000	
	63 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	487.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
64	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.027.000	
65	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.367.000	
66	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	572.000	
67	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.040.000	
68	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	487.000	
69	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.027.000	
70	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.457.000	
71	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Palembang	1 Perkara	572.000	
72	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.040.000	
73	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	487.000	
74	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.027.000	
75	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.367.000	
76	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	572.000	
77	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.040.000	
78	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	487.000	
79	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Lampung	1 Perkara	1.027.000	
80	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.407.000	
81	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	580.000	
82	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	938.000	
83	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	399.000	
84	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Kalimantan Barat	1 Perkara	890.000	
85	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	1.507.000	
86	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	540.000	
87	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	937.000	
88	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	397.000	
89	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	880.000	
90	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	1.501.000	
91	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	550.000	
92	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	897.000	
93	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	398.000	
94	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	880.000	
95	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	1.501.000	
96	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	550.000	
97	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	897.000	
98	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	398.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
99	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	890.000	
100	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	1.533.000	
101	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	550.000	
102	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	897.000	
103	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	395.000	
104	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	880.000	
105	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	1.501.000	
106	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	411.000	
107	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	902.000	
108	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	402.000	
109	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	880.000	
110	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	1.515.000	
111	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	580.000	
112	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	937.000	
113	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	405.000	
114	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	641.000	
115	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	1.541.000	
116	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	543.000	
117	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	876.000	
118	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	523.000	
119	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	647.000	
120	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	1.515.000	
121	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	669.000	
122	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.056.000	
123	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	569.000	
124	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Maluku	1 Perkara	920.000	
125	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.522.000	
126	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Denpasar	1 Perkara	571.000	
127	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Denpasar	1 Perkara	1.056.000	
128	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	560.000	
129	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	956.000	
130	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	1.567.000	
131	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	557.000	
132	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	897.000	
133	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	551.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
134	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	735.000	
135	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	1.537.000	
136	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	557.000	
137	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	897.000	
138	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	535.000	
139	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	941.000	
140	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	1.537.000	
141	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	647.000	
142	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	1.057.000	
143	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	492.000	
144	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.036.000	
145	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.665.000	
146	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	571.000	
147	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.042.000	
148	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	468.000	
149	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Bengkulu	1 Perkara	1.027.000	
150	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.505.000	
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara			
151	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	920.000	
152	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banten	1 Perkara	920.000	
153	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	920.000	
154	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Gorontalo	1 Perkara	920.000	
155	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	920.000	
156	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Jawa Barat	1 Perkara	920.000	
157	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	920.000	
158	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	920.000	
159	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Jawa Timur	1 Perkara	920.000	
160	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Banda Aceh	1 Perkara	920.000	
161	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	920.000	
162	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	920.000	
163	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau	1 Perkara	920.000	
164	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Jambi	1 Perkara	920.000	
165	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Palembang	1 Perkara	920.000	
166	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung	1 Perkara	920.000	
167	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	750.000	
168	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	760.000	
169	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	760.000	
170	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	800.000	
171	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	760.000	
172	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	920.000	
173	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	790.000	
174	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	920.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	175 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku	1 Perkara	920.000	
	176 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Denpasar	1 Perkara	920.000	
	177 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	920.000	
	178 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	920.000	
	179 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Papua	1 Perkara	920.000	
	180 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	920.000	
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu			Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu
	1 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	537.000	
	2 Perkara Pidana Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	747.000	
	3 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi I Medan	1 Perkara	880.050	
	4 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Pengadilan Militer Tinggi I Medan	1 Perkara	613.000	
	5 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1 Perkara	910.333	
	6 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1 Perkara	530.000	
	7 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1 Perkara	1.306.250	
	8 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1 Perkara	897.495	
	9 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 01 Banda Aceh	1 Perkara	809.454	
	10 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 02 Medan	1 Perkara	757.445	
	11 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 03 Padang	1 Perkara	820.920	
	12 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 04 Palembang	1 Perkara	722.093	
	13 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 05 Pontianak	1 Perkara	833.388	
	14 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 06 Banjarmasin	1 Perkara	796.333	
	15 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL I - 07 Balikpapan	1 Perkara	852.037	
	16 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL II - 08 Jakarta	1 Perkara	712.280	
	17 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL II - 09 Bandung	1 Perkara	662.388	
	18 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL II - 10 Semarang	1 Perkara	710.142	
	19 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL II - 11 Yogyakarta	1 Perkara	764.200	
	20 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 12 Surabaya	1 Perkara	687.750	
	21 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama Wilayah Hukum DILMIL III - 13 Madiun	1 Perkara	761.875	
	22 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 14 Denpasar	1 Perkara	780.900	
	23 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 15 Kupang	1 Perkara	859.366	
	24 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 16 Makassar	1 Perkara	775.343	
	25 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama Wilayah Hukum DILMIL III - 17 Manado	1 Perkara	822.052	
	26 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 18 Ambon	1 Perkara	800.000	
	27 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Hukum DILMIL III - 19 Jayapura	1 Perkara	1.021.060	



Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia (006)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah I	1 Lapdu	3.300.000	
	2 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah I	1 Lapdu	7.300.000	
	3 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah II	1 Lapdu	3.300.000	
	4 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah II	1 Lapdu	7.300.000	
	5 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah III	1 Lapdu	3.300.000	
	6 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah III	1 Lapdu	7.300.000	
	7 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah IV	1 Lapdu	3.300.000	
	8 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah IV	1 Lapdu	7.300.000	
	9 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah V	1 Lapdu	3.300.000	
	10 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah V	1 Lapdu	7.300.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Output)			
	Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan			
	1 Diklat Terpadu Penanganan ABH Berdasarkan UU SPPA	1 Angkatan	377.237.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri (010)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
010.01	Sekretariat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Literatur			
	1 Penyusunan Literatur Pengajaran Program D4 dan S1 Semester Ganjil dan Genap	20 Literatur	909.450.000	
	Modul			
	2 Penyusunan Modul Fakultas Politik Pemerintahan	13 Modul	506.200.000	
	3 Penyusunan Modul Fakultas Manajemen Pemerintahan	14 Modul	532.475.000	
	4 Penyusunan Modul Fakultas Hukum Tata Pemerintahan	13 Modul	506.469.000	
	RPS/RTM			
	5 Penyusunan RPS dan RTM Pengajaran Semester Ganjil dan Genap	15 RPS dan RTM	553.491.000	
	6 Penyusunan RPS dan RTM Pelatihan Semester Ganjil dan Genap	12 RPS dan RTM	236.720.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Penilaian Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri			
	7 Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	1 Batch	109.595.000	
	8 Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1 Batch	117.295.000	
	9 Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1 Batch	135.477.000	
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Angkatan Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi			
	1 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	81.909.000	
	2 Diklat 6 Hari	1 Angkatan	92.772.000	
	Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Kantor Pusat			
	3 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	81.909.000	
	Angkatan Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan			
	4 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	81.909.000	
	Angkatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Teknis			
	5 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	81.909.000	
	6 Diklat 12 Hari	1 Angkatan	149.675.000	
	7 Diklat 14 Hari	1 Angkatan	175.713.000	
	Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional			
	8 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	81.909.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	Kementerian Pertahanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat			
1	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	28.497.000	
2	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	32.620.000	
3	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	35.567.000	
4	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	29.674.000	
5	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	118.828.000	
6	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	8.423.000	
7	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	9.172.000	
8	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	9.708.000	
9	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	8.637.000	
10	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	24.862.000	
11	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.113.000	
12	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	15.452.000	
13	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	16.470.000	
14	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.077.000	
15	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	39.841.000	
16	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	11.944.000	
17	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	12.747.000	
18	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	13.336.000	
19	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	12.319.000	
20	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	28.663.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat			
21	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	26.432.000	
22	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	30.931.000	
23	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	34.145.000	
24	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	27.717.000	
25	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	124.968.000	
26	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.719.000	
27	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	11.593.000	
28	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	12.932.000	
29	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	10.255.000	
30	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	50.764.000	
31	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.756.000	
32	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	16.845.000	
33	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	18.398.000	
34	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.934.000	
35	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	56.716.000	
36	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	14.808.000	
37	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	17.807.000	
38	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	19.950.000	
39	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	15.665.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
40	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	80.484.000	
	Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion)			
41	Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion)	1 Layanan	906.000	
	Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan			
42	Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	1 Perkara	8.487.000	
	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian			
43	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-23	1 Lulusan	5.471.000	
44	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-24	1 Lulusan	5.471.000	
45	Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian PBB Ke-25	1 Lulusan	5.471.000	
46	Kursus Intensif Bahasa Arab bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-4	1 Lulusan	5.471.000	
47	Kursus Intensif Bahasa Perancis bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-5	1 Lulusan	5.471.000	
48	Kursus Intensif Bahasa Perancis bagi Pasukan Perdamaian PBB Ke-6	1 Lulusan	5.471.000	
	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah			
49	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah DKI	1 Lulusan	5.471.000	
50	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah Jatim	1 Lulusan	5.471.000	
51	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah Jabar	1 Lulusan	5.471.000	
	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar			
52	KIBINA Tk. Dasar ke-18	1 Lulusan	7.103.000	
53	KIBINA Tk. Dasar ke-19	1 Lulusan	7.103.000	
54	KIBINA Tk. Dasar ke-20	1 Lulusan	7.103.000	
	Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa Inggris			
55	Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Lulusan	5.471.000	
	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris			
56	KIBI ke-96	1 Lulusan	5.471.000	
57	KIBI ke-97	1 Lulusan	5.471.000	
58	Kursus Intensif Bahasa Inggris Executive	1 Lulusan	5.471.000	
59	Kursus Intensif Bahasa Inggris PNS Kemhan	1 Lulusan	5.471.000	
60	Kursus Intensif Bahasa Inggris TOEFL	1 Lulusan	5.471.000	
61	Kursus Intensif Bahasa Inggris Alih Bahasa	1 Lulusan	5.471.000	
62	Kursus Intensif Bahasa Inggris IELTS	1 Lulusan	5.471.000	
	Lulusan Kursus Bahasa Indonesia Tk. Menengah ke- 13			
63	KIBINA Tk. Menengah	1 Lulusan	7.103.000	
	Lulusan Kursus Bahasa Indonesia Perwira SAF			
64	KIBINA bagi Perwira SAF	1 Lulusan	7.103.000	
	Lulusan Kursus Bahasa Asing (Non Inggris)			
65	Kursus Intensif Bahasa Arab	1 Lulusan	5.471.000	
66	Kursus Intensif Bahasa Korea	1 Lulusan	5.471.000	
67	Kursus Intensif Bahasa Mandarin	1 Lulusan	5.471.000	
68	Kursus Intensif Bahasa Perancis	1 Lulusan	5.471.000	
69	Kursus Intensif Bahasa Rusia	1 Lulusan	5.471.000	
70	Kursus Intensif Bahasa Jepang	1 Lulusan	5.471.000	
71	Kursus Intensif Bahasa Jerman	1 Lulusan	5.471.000	
	Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama			
72	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama	1 Lulusan	5.529.883	
	Lulusan Kursus Dasar Manajemen Pertahanan			
73	Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Lulusan	5.848.711	
	Lulusan Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan			
74	Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Lulusan	7.633.766	
	Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan			
75	Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan	1 Lulusan	5.370.255	
	Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda			
76	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda	1 Lulusan	5.818.155	
	Lulusan Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan Pertahanan			
77	Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan Pertahanan	1 Lulusan	5.576.050	
	Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan			
78	Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Lulusan	6.369.977	
	Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan			
79	Kursus Manajemen Pengadaan Pertahanan	1 Lulusan	5.600.300	
80	Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan	1 Lulusan	5.219.216	
	Lulusan Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan			
81	Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan	1 Lulusan	5.426.644	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan			
82	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor Tingkat Terampil	1 Lulusan	9.162.000	
83	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor Ahli	1 Lulusan	7.663.000	
84	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Muda	1 Lulusan	8.967.000	
85	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analisis Pertahanan Negara	1 Lulusan	7.727.000	
86	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kataloger Tingkat Dasar	1 Lulusan	6.420.000	
87	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil	1 Lulusan	7.717.000	
88	Diklat Fungsional Penjurangan Arsiparis Tingkat Terampil ke Arsiparis Tingkat Ahli	1 Lulusan	413.000	
89	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Audit Investigatif	1 Lulusan	550.000	
90	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keamanan Jaringan Komputer	1 Lulusan	7.155.000	
91	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknisi Komputer	1 Lulusan	6.905.000	
92	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mikrotik Komputer	1 Lulusan	7.971.000	
93	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bendahara Pengeluaran	1 Lulusan	505.000	
94	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bendahara Penerimaan	1 Lulusan	505.000	
95	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perencanaan Penganggaran Bagi Staf Perencana	1 Lulusan	505.000	
96	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	1 Lulusan	505.000	
97	Diklat Teknis Angka Kredit dan Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Kesehatan	1 Lulusan	505.000	
98	Pendidikan dan Pelatihan Teknis <i>Cyber Defence</i> Tingkat Terampil	1 Lulusan	8.145.000	
99	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	1 Lulusan	470.000	
100	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat	1 Lulusan	5.250.000	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat III			
101	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat III	1 Lulusan	5.434.000	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS			
102	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS	1 Lulusan	5.040.000	
012.21	Markas Besar TNI			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TNI			
1	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon I	1 Orang	114.294	
2	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon II	1 Orang	116.394	
3	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon III	1 Orang	115.294	
4	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon IV	1 Orang	119.494	
5	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon V	1 Orang	122.594	
6	Rahwan Rayon I	1 Orang	145.294	
7	Rahwan Rayon II	1 Orang	147.394	
8	Rahwan Rayon III	1 Orang	146.394	
9	Rahwan Rayon IV	1 Orang	150.494	
10	Rahwan Rayon V	1 Orang	153.594	
	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI			
11	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Orang	363.868	
	Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia			
12	Seleksi Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Orang	2.269.531	
13	Kegiatan Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Orang	7.205.117	
14	Purna Tugas Yon Mekanis TNI (850 Orang) Kontingen Garuda di Dalam Negeri	1 Orang	1.881.988	
15	Seleksi <i>Force Protection Company</i> (FPC) Kontingen Garuda di Dalam Negeri	1 Orang	1.609.900	
16	Kegiatan <i>Force Protection Company</i> (FPC) Kontingen Garuda di Dalam Negeri	1 Orang	8.053.866	
17	Purna Tugas <i>Force Protection Company</i> (FPC) Kontingen Garuda di Dalam Negeri	1 Orang	1.751.146	
18	Seleksi Satgas <i>Military Police Unit</i> (MPU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	2.246.666	
19	Kegiatan <i>Military Police Unit</i> (MPU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	9.676.946	
20	Purna Tugas <i>Military Police Unit</i> (MPU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	2.001.000	
21	Seleksi <i>Force Headquarter Support Unit</i> (FHQSU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Perdamaian PBB untuk Melaksanakan Misi di Lebanon	1 Orang	2.765.200	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
22	Kegiatan Satgas <i>Force Headquarter Support Unit</i> (FHQSU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	11.565.300	
23	Purna Tugas Satgas <i>Force Headquarter Support Unit</i> (FHQSU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi di Lebanon	1 Orang	2.192.480	
24	Seleksi Satgas <i>Military Community Outreach Unit</i> (MCOU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi di Lebanon	1 Orang	2.945.166	
25	Kegiatan Satgas <i>Military Community Outreach Unit</i> (MCOU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	17.446.777	
26	Purna Tugas <i>Military Community Outreach Unit</i> (MCOU) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	2.976.777	
27	Seleksi <i>Civil Military Coordination</i> (CIMIC) TNI di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	5.016.000	
28	Kegiatan <i>Civil Military Coordination</i> (CIMIC) TNI di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	31.366.571	
29	Purna Tugas <i>Civil Military Coordination</i> (CIMIC) TNI di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	4.627.571	
30	Seleksi <i>Level II Hospital</i> TNI di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	4.233.222	
31	Kegiatan <i>Level II Hospital</i> TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	25.424.666	
32	Purna Tugas <i>Level II Hospital</i> TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	3.779.000	
33	Seleksi <i>Maritime Task Force</i> (MTF) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi di Lebanon	1 Orang	5.202.719	
34	Kegiatan <i>Maritime Task Force</i> (MTF) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi di Lebanon	1 Orang	10.485.766	
35	Purna Tugas <i>Maritime Task Force</i> (MTF) TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNIFIL di Lebanon	1 Orang	1.758.757	
36	Seleksi Yon Komposit TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNAMID di Darfur	1 Orang	2.225.867	
37	Kegiatan Yon Komposit TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNAMID di Darfur	1 Orang	6.944.781	
38	Purna Tugas Yon Komposit TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi UNAMID	1 Orang	1.751.062	
39	Seleksi Yon Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	2.215.562	
40	Kegiatan Yon Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	6.459.977	
41	Purna Tugas Yon Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO Kongo	1 Orang	1.654.176	
42	Seleksi KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	3.508.617	
43	Kegiatan Latpratugas KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	6.779.297	
44	Kegiatan Pemberangkatan KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	2.935.325	
45	Purna Tugas KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MONUSCO di Kongo	1 Orang	2.035.262	
46	Seleksi KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	3.169.257	
47	Kegiatan KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	8.267.175	
48	Purna Tugas Satgas KIZI TNI Kontingen Garuda di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	1.617.980	
49	Seleksi Satgas KI Passus Kongo di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	1.772.683	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
50	Kegiatan KI Passus Konga di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	8.479.746	
51	Purna Tugas KI Passus Konga di Dalam Negeri sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk Pelaksanaan Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah	1 Orang	1.596.313	
52	Seleksi <i>International Monitoring Team</i> (IMT) untuk Pelaksanaan Misi di Filipina	1 Orang	1.914.083	
53	Kegiatan <i>International Monitoring Team</i> (IMT) untuk Pelaksanaan Misi di Filipina	1 Orang	519.082.166	
	Peserta Operasi Rutin Integratif			
54	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I	1 Orang	75.488	
55	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II	1 Orang	79.588	
56	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III	1 Orang	78.588	
57	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV	1 Orang	80.688	
58	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V	1 Orang	82.688	
	Peserta Operasi Intelijen Rutin			
59	Rayon I	1 Orang	161.148	
60	Rayon II	1 Orang	164.148	
61	Rayon III	1 Orang	170.148	
62	Rayon IV	1 Orang	171.148	
63	Rayon V	1 Orang	179.148	
	Peserta Operasi Teritorial Integratif			
64	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I	1 Orang	123.483	
65	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II	1 Orang	130.483	
66	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III	1 Orang	129.483	
67	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV	1 Orang	135.483	
68	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V	1 Orang	138.483	
69	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Terpusat	1 Orang	231.253	
70	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon I	1 Orang	242.657	
71	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon II	1 Orang	249.657	
72	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon III	1 Orang	248.657	
73	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon IV	1 Orang	254.657	
74	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon V	1 Orang	257.657	
75	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I	1 Orang	107.482	
76	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II	1 Orang	114.482	
77	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III	1 Orang	113.482	
78	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV	1 Orang	119.482	
79	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V	1 Orang	122.482	
80	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Dacrah Rayon I	1 Orang	99.228	
81	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon II	1 Orang	106.228	
82	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon III	1 Orang	105.228	
83	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon IV	1 Orang	111.228	
84	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon V	1 Orang	114.228	
85	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan dan Pam Puter	1 Orang	182.380	
	Peserta Peggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI			
86	Peserta Peggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI	1 Orang	471.411	
	Calon Perwira Karier (Pa PK)			
87	Seleksi Penerimaan (<i>Werving</i>) Calon Pa PK TNI	1 Orang	17.657.000	
	Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar			
88	Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar (Pria)	1 Orang	14.990.540	
89	Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Wanita)	1 Orang	17.124.146	
	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar			
90	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar	1 Orang	4.962.820	
91	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar Lanjutan	1 Orang	4.963.230	
	Lulusan Dikma Pa PK Pria			
92	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI	1 Orang	9.420.789	
	Lulusan Dikma Pa PK Wanita			
93	Pendidikan Pertama Pa PK Wanita TNI	1 Orang	10.156.996	
	Seleksi Dikreg Sesko TNI			
94	Seleksi Dikreg Sesko TNI	1 Orang	6.064.000	
	Lulusan Sesko TNI			
95	Lulusan Sesko TNI	1 Orang	6.575.915	
	Lulusan Pendidikan Spesialisasi/Pengembangan Profesi TNI			
96	Lulusan Dikbangspes Suspa TNI	1 Orang	4.706.916	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
97	Lulusan Dikbangspes Susba TNI	1 Orang	4.136.416	
98	Lulusan Dikbangspes SIP TNI	1 Orang	14.204.350	
99	Lulusan Dikbangspes Susjabkimil	1 Orang	4.859.111	
100	Lulusan Dikbangspes Susjabormil	1 Orang	4.845.096	
101	Lulusan Dikbangspes Susgati Bintang	1 Orang	4.847.555	
102	Lulusan DIK SAR TNI	1 Orang	4.864.444	
103	Lulusan Kursus Penanggulangan Bencana Alam	1 Orang	4.864.444	
104	Kursus Dasar Perwira Intelijen	1 Orang	4.847.100	
105	Kursus Perwira Kontra Intelijen	1 Orang	5.067.600	
106	Kursus Perwira Intelijen Strategis	1 Orang	4.782.240	
107	Kursus Perwira Sandi dan Intelijen	1 Orang	4.503.429	
108	Kursus Bintara Sandi dan Intelijen	1 Orang	4.265.875	
109	Kursus Dasar Bintara Intelijen	1 Orang	4.316.425	
110	Kursus Perwira Siber dan Intelijen	1 Orang	5.318.800	
111	Kursus Bintara Siber dan Intelijen	1 Orang	5.202.911	
112	Kursus Perwira Intelijen Medis	1 Orang	5.046.300	
113	Kursus Perwira Intelijen Ekonomi	1 Orang	5.672.800	
114	Pembekalan Intelijen	1 Orang	195.958	
115	Penataran/Latihan Gabungan Bangspes	1 Orang	163.333	
116	Penataran/Latihan PA Bangspes	1 Orang	163.333	
117	Penataran/Latihan BA Bangspes	1 Orang	162.050	
118	Penataran/Latihan TA Bangspes	1 Orang	160.000	
119	Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen (SMAI)	1 Orang	10.553.740	
120	Kursus Perwira Intelijen Teknik	1 Orang	5.719.480	
121	Kursus Bintara Intelijen Teknik	1 Orang	5.528.280	
122	Kursus Perwira Intelijen Startegis Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.730.817	
123	Kursus Suspa Penggalangan	1 Orang	5.231.880	
124	Kursus Perwira PCI	1 Orang	5.179.640	
125	Kursus Perwira Litpres	1 Orang	5.233.640	
126	Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.781.220	
127	Penataran Isteri Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.839.415	
128	Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	5.082.400	
129	Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial	1 Orang	4.294.900	
130	Lulusan Sekbang Terpadu TNI	1 Orang	9.515.000	
	Seleksi Dikbangspes TNI			
131	Seleksi Sus Jab Oditor Militer	1 Orang	6.016.000	
132	Seleksi Sus Jab Hakim Militer	1 Orang	6.016.000	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri			
133	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.330.525	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri			
134	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	122.972	
	Latihan Kesiapsiagaan Operasi			
135	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah I	1 Orang	142.138	
136	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah II	1 Orang	142.738	
137	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah III	1 Orang	143.338	
138	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah IV	1 Orang	143.938	
139	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah V	1 Orang	144.538	
	Latihan Pembinaan Balakpus TNI			
140	Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI	1 Orang	163.616	
141	Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI	1 Orang	134.875	
	Latihan Pratugas Operasi			
142	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah I)	1 Orang	106.104	
143	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah II)	1 Orang	108.633	
144	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah III)	1 Orang	113.804	
145	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah IV)	1 Orang	118.975	
146	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V)	1 Orang	127.004	
147	Peserta Latihan Pratugas Operasi PAM Ambalat/Puter (Wilayah I)	1 Orang	101.407	
148	Peserta Latihan Pratugas Operasi PAM Ambalat/Puter (Wilayah II)	1 Orang	103.691	
149	Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel	1 Orang	165.159	
	Layanan Operasional Pertahanan			
150	Pendapat dan Saran Hukum	1 Kegiatan	906.000	
	Laporan Penyidikan Perkara Pidana dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit			
151	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	22.000.000	
152	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Perkara	2.180.000	
153	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana	1 Perkara	13.060.000	
	Laporan Pengurusan Tahanan			
154	Pengurusan Tahanan Sementara	1 Orang	47.000	
155	Pengurusan Tahanan dalam Proses Penuntutan	1 Orang	45.000	
	Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer			
156	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	43.346.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
157	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	48.220.000	
158	Penuntutan dan Pengolahan perkara pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	51.701.000	
159	Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	44.841.000	
160	Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana militer Rayon 5	1 Perkara	145.701.000	
161	Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana militer di Otmilti Rayon 1	1 Perkara	94.816.000	
162	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2	1 Perkara	114.223.000	
163	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3	1 Perkara	133.629.000	
164	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4	1 Perkara	133.629.000	
165	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5	1 Perkara	178.962.000	
166	Penuntutan dan pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Perkara	4.944.000	
167	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	4.975.000	
168	Penuntutan dan pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	5.552.000	
169	Penuntutan dan pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	6.045.000	
170	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	5.127.000	
171	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	18.189.000	
172	Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer	1 Perkara	7.702.000	
173	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	1.058.000	
174	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	1.135.000	
175	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	1.191.000	
176	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	1.058.000	
177	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	2.701.000	
178	Petunjuk Teknis Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	7.765.000	
179	Lelang Sita Rampasan	1 Perkara	42.615.000	
180	Eksekusi Orang dan Barang	1 Perkara	16.178.000	
Laporan Pembinaan Napi				
181	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1 Orang	127.000	
182	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Orang	133.000	
183	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Orang	136.000	
184	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Orang	139.000	
185	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Orang	208.555	
186	Juknis Pembinaan Napi Prajurit TNI	1 Orang	2.434.000	
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer				
187	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I	1 Perkara	18.047.000	
188	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	12.669.000	
189	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	10.569.000	
190	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	12.340.000	
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum				
191	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Perkara	26.440.000	
192	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	14.769.000	
193	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Tk. Kasasi	1 Perkara	11.586.000	
194	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Tk. PK	1 Perkara	17.148.000	
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat				
195	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Perkara	42.734.000	
196	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Perkara	19.281.000	
197	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Perkara	24.971.000	
198	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Perkara	22.394.000	
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat				
199	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK I	1 Perkara	114.466.000	
200	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Perkara	20.549.000	
201	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Perkara	25.622.000	
202	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Perkara	25.144.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi			
	203 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Perkara	15.430.000	
012.22	Markas Besar TNI AD			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Peserta Latihan Kematraan			
	1 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	3.500.000	
	2 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	4.000.000	
	3 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	4.500.000	
	4 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	5.000.000	
	5 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS dan Detasemen)	1 Latihan	5.500.000	
	6 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	5.000.000	
	7 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	5.500.000	
	8 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	6.000.000	
	9 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	6.500.000	
	10 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)	1 Latihan	7.000.000	
	11 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	6.000.000	
	12 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	6.500.000	
	13 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	7.000.000	
	14 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	7.500.000	
	15 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Latihan	8.000.000	
	16 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	7.000.000	
	17 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	7.500.000	
	18 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	8.000.000	
	19 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	8.500.000	
	20 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Latihan	9.000.000	
	21 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	4.000.000	
	22 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	4.500.000	
	23 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	5.000.000	
	24 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	5.500.000	
	25 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam dan Balak Aju)	1 Latihan	6.000.000	
	26 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	3.000.000	
	27 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	3.500.000	
	28 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.000.000	
	29 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.500.000	
	30 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.000.000	
	31 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	1.500.000	
	32 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	2.000.000	
	33 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	2.500.000	
	34 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	3.000.000	
	35 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)	1 Latihan	3.500.000	
	36 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	3.500.000	
	37 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.000.000	
	38 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.500.000	
	39 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.000.000	
	40 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.500.000	
	41 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.000.000	
	42 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	4.500.000	
	43 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Latihan	5.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
44	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Latihan	5.500.000	
45	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Latihan	6.000.000	
46	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Latihan	1.000.000	
47	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Latihan	1.500.000	
48	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Latihan	2.000.000	
49	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Latihan	2.500.000	
50	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Latihan	3.000.000	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri			
51	Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri dengan (Gun Pesawat Komersil)	1 Latihan	4.860.393	
52	Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri (Gun Pesawat TNI AU)	1 Latihan	4.684.986	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri			
53	Latihan Bersama di Dalam Negeri Tanpa Alutsista	1 Latihan	245.279	
54	Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri dengan Pelibatan Alutsista	1 Latihan	272.530	
	Lulusan Dikma Koptar			
55	Kopral Taruna Pria	1 OB	4.782.000	
56	Kopral Taruna Wanita	1 OB	4.782.000	
	Lulusan Dikma Sertar			
57	Sersan Taruna Pria	1 OB	5.031.000	
58	Sersan Taruna Wanita	1 OB	5.031.000	
	Lulusan Dikma Sermadatar			
59	Sermadatar Pria	1 OB	5.101.000	
60	Sermadatar Wanita	1 OB	5.101.000	
	Lulusan Dikma Sermatutar			
61	Sermatutar Pria	1 OB	5.158.000	
62	Sermatutar Wanita	1 OB	5.158.000	
	Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat			
63	Secaba Pria Rayon I	1 OB	3.470.000	
64	Secaba Pria Rayon II	1 OB	3.515.000	
65	Secaba Pria Rayon III	1 OB	3.680.000	
66	Secaba Pria Rayon IV	1 OB	3.725.000	
67	Secaba Pria Rayon V	1 OB	3.920.000	
	Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat			
68	Dikmaba Wanita	1 OB	3.470.000	
	Lulusan Dikma Secatam Matra Darat			
69	Dikmata Rayon I	1 OB	3.250.000	
70	Dikmata Rayon II	1 OB	3.300.000	
71	Dikmata Rayon III	1 OB	3.470.000	
72	Dikmata Rayon IV	1 OB	3.500.000	
73	Dikmata Rayon V	1 OB	3.690.000	
74	Pra Dikma TA	1 OB	3.480.000	
	Calon Taruna Matra Darat			
75	Werving Taruna Matra Darat	1 OB	25.705.908	
	Calon Bintara Matra Darat			
76	Werving Bintara Umum Matra Darat	1 OB	6.425.983	
77	Werving Bintara Sumber Pulau Terluar/Perbatasan/Pedalaman Matra Darat	1 OB	16.328.765	
	Calon Tamtama Matra Darat			
78	Werving Tamtama Matra Darat	1 OB	5.370.903	
79	Werving Calon Tamtama Sumber Pulau Terluar/Perbatasan/Pedalaman Matra Darat	1 OB	14.567.672	
	Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat			
80	Diktukpa Reg/Sus	1 OB	3.834.000	
	Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat			
81	Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 OB	3.440.000	
82	Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 OB	3.480.000	
83	Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 OB	3.620.000	
84	Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 OB	3.680.000	
85	Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 OB	3.845.000	
	Peserta Secapareg Matra Darat			
86	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 OK	1.642.000	
87	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 OK	1.683.000	
88	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 OK	1.690.000	
89	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 OK	1.719.000	
90	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 OK	1.727.000	
	Peserta Secabareg Matra Darat			
91	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 OK	1.271.000	
92	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 OK	1.285.000	
93	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 OK	1.324.000	
94	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 OK	1.344.000	
95	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 OK	1.387.000	
	Lulusan Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol III PNS			
96	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon I	1 Kegiatan	3.013.000	
97	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon II	1 Kegiatan	3.034.333	
98	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon III	1 Kegiatan	3.144.333	
99	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon IV	1 Kegiatan	3.165.666	
100	Diklat Alih Golongan dari Gol. II ke Gol. III PNS Rayon V	1 Kegiatan	3.297.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Lulusan Seskoad			
101	Seskoad	1 OB	4.788.000	
	Lulusan Selapa Matra Darat			
102	Diklapa I/Diklapa II Cab Satpur/Banpur	1 OB	3.893.000	
103	Diklapa I/Diklapa II Cab Banmin	1 OB	3.703.000	
	Peserta Seskoad			
104	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon I	1 OK	6.143.000	
105	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon II	1 OK	6.153.000	
106	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon III	1 OK	6.218.000	
107	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon IV	1 OK	6.211.000	
108	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon V	1 OK	6.292.000	
	Peserta Selapa Matra Darat			
109	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I	1 OK	4.104.000	
110	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II	1 OK	4.064.000	
111	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III	1 OK	4.188.000	
112	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV	1 OK	4.242.000	
113	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V	1 OK	4.270.000	
	Lulusan Diklatpim PNS			
114	Diklatpim Tk. IV	1 Kegiatan	6.579.666	
	Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Darat			
115	Dikbangspespa Cab Satpur/Banpur	1 OB	3.679.000	
116	Dikbangspespa Cab Banmin	1 OB	3.499.000	
117	Dikcab Perwira Satpur/Banpur	1 OB	5.140.000	
118	Dikcab Perwira Banmin	1 OB	4.835.000	
	Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Darat			
119	Dikbangspesba Rayon I	1 OB	3.077.000	
120	Dikbangspesba Rayon II	1 OB	3.122.000	
121	Dikbangspesba Rayon III	1 OB	3.282.000	
122	Dikbangspesba Rayon IV	1 OB	3.322.000	
123	Dikbangspesba Rayon V	1 OB	3.512.000	
124	Dikjur Bintara Rayon I	1 OB	3.226.000	
125	Dikjur Bintara Rayon II	1 OB	3.296.000	
126	Dikjur Bintara Rayon III	1 OB	3.426.000	
127	Dikjur Bintara Rayon IV	1 OB	3.476.000	
128	Dikjur Bintara Rayon V	1 OB	3.666.000	
129	Lulusan Diklatnis PNS	1 OB	5.432.166	
	Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Darat			
130	Dikbangspesta Rayon I	1 OB	2.956.000	
131	Dikbangspesta Rayon II	1 OB	2.996.000	
132	Dikbangspesta Rayon III	1 OB	3.126.000	
133	Dikbangspesta Rayon IV	1 OB	3.161.000	
134	Dikbangspesta Rayon V	1 OB	3.356.000	
135	Dikjur Tamtama Rayon I	1 OB	3.056.000	
136	Dikjur Tamtama Rayon II	1 OB	3.118.000	
137	Dikjur Tamtama Rayon III	1 OB	3.261.000	
138	Dikjur Tamtama Rayon IV	1 OB	3.291.000	
139	Dikjur Tamtama Rayon V	1 OB	3.478.000	
	Peserta Dikbangspes Matra Darat			
140	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon I	1 OK	1.196.000	
141	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon II	1 OK	1.251.000	
142	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon III	1 OK	1.256.000	
143	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon IV	1 OK	1.261.000	
144	Peserta Dikbangspes PA/BA/TA Rayon V	1 OK	1.306.000	
	Lulusa Pendidikan Keahlian			
145	Pendidikan Keahlian Rayon I	1 OB	3.684.000	
146	Pendidikan Keahlian Rayon II	1 OB	3.714.000	
147	Pendidikan Keahlian Rayon III	1 OB	3.874.000	
148	Pendidikan Keahlian Rayon IV	1 OB	3.914.000	
149	Pendidikan Keahlian Rayon V	1 OB	4.104.000	
150	Pendidikan Komando dan Gultor	1 OB	4.914.000	
151	Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus	1 OB	3.734.000	
	Lulusan Dik Iptek			
152	Dik Iptek S-1	1 OB	3.645.000	
153	Dik Iptek D-3 (Rayon I)	1 OB	3.058.000	
154	Dik Iptek D-3 (Rayon II)	1 OB	3.098.000	
155	Dik Iptek D-3 (Rayon III)	1 OB	3.268.000	
156	Dik Iptek D-3 (Rayon IV)	1 OB	3.318.000	
157	Dik Iptek D-3 (Rayon V)	1 OB	3.513.000	
158	Dik Iptek SMK (Rayon I)	1 OB	3.002.000	
159	Dik Iptek SMK (Rayon II)	1 OB	3.047.000	
160	Dik Iptek SMK (Rayon III)	1 OB	3.212.000	
161	Dik Iptek SMK (Rayon IV)	1 OB	3.257.000	
162	Dik Iptek SMK (Rayon V)	1 OB	3.442.000	
163	Pendidikan Iptek D4 Matra Darat	1 OB	3.600.000	
	Peserta Dik Profesi dan Keahlian			
164	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I	1 OK	1.833.000	
165	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II	1 OK	1.841.000	
166	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III	1 OK	1.872.000	
167	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV	1 OK	1.876.000	
168	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V	1 OK	1.901.000	
	Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit			
169	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Laporan	8.800.000	
170	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Laporan	9.450.000	
171	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Laporan	9.900.000	
172	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Laporan	9.040.000	
173	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Laporan	22.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
174	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I	1 Laporan	5.973.000	
175	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II	1 Laporan	6.310.000	
176	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III	1 Laporan	6.535.000	
177	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV	1 Laporan	6.063.000	
178	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V	1 Laporan	13.060.000	
	Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit			
179	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Laporan	2.180.000	
180	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Laporan	2.330.000	
181	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Laporan	2.430.000	
182	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Laporan	2.220.000	
183	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Laporan	5.355.000	
	Laporan Pengurusan Tahanan			
184	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Laporan	46.975	
185	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Laporan	48.525	
186	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Laporan	53.575	
187	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Laporan	48.575	
188	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Laporan	61.625	
189	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon I	1 Laporan	44.224	
190	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon II	1 Laporan	45.051	
191	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon III	1 Laporan	50.155	
192	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon IV	1 Laporan	46.793	
193	Pengurusan Tahanan Pidana dalam Proses Penuntutan Rayon V	1 Laporan	57.965	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer			
194	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Laporan	6.455.000	
195	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Laporan	6.916.000	
196	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Laporan	7.248.000	
197	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Laporan	6.605.000	
198	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Laporan	16.245.000	
199	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.471.000	
200	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.471.000	
201	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.910.000	
202	Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)	1 Laporan	906.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum			
203	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Laporan	13.198.000	
204	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Laporan	15.092.000	
205	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Laporan	16.407.000	
206	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Laporan	13.739.000	
207	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Laporan	52.627.000	
208	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.571.000	
209	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. ..	1 Laporan	3.508.000	
210	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	6.330.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Penggugat			
211	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Penggugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	28.497.000	
212	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Penggugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	32.620.000	
213	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Penggugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	35.567.000	
214	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	29.674.000	
215	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Penggugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	118.828.000	
216	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pembanding Rayon I	1 Laporan	8.423.000	
217	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pembanding Rayon II	1 Laporan	9.172.000	
218	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pembanding Rayon III	1 Laporan	9.708.000	
219	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pembanding Rayon IV	1 Laporan	8.637.000	
220	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pembanding Rayon V	1 Laporan	24.862.000	
221	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	14.113.000	
222	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	15.452.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	223 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	16.470.000	
	224 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	15.077.000	
	225 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	39.841.000	
	226 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	11.944.000	
	227 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	12.747.000	
	228 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	13.336.000	
	229 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	12.319.000	
	230 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	28.663.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Tergugat			
	231 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Tergugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	26.432.000	
	232 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Tergugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	30.931.000	
	233 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Tergugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	34.145.000	
	234 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	27.717.000	
	235 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Tergugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	124.968.000	
	236 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Laporan	9.719.000	
	237 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Laporan	11.593.000	
	238 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Laporan	12.932.000	
	239 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Laporan	10.255.000	
	240 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Laporan	50.764.000	
	241 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	14.756.000	
	242 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	16.845.000	
	243 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	18.398.000	
	244 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	15.934.000	
	245 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	56.716.000	
	246 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	14.808.000	
	247 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	17.807.000	
	248 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	19.950.000	
	249 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	15.665.000	
	250 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	80.484.000	
	251 Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)	1 Laporan	906.000	
	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi			
	252 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon I	1 Perkara	10.090.000	
	253 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon II	1 Perkara	10.799.000	
	254 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon III	1 Perkara	11.618.000	
	255 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon IV	1 Perkara	11.982.000	
	256 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon V	1 Perkara	42.411.000	
012.23	Markas Besar TNI AL			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran			
	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Taktis TNI			
	1 Penggelaran Satgas Operasi Intel Taktis TNI	1 Orang	425.866	
	Calon Taruna			
	2 Calon Taruna	1 Orang	25.747.000	
	Calon Bintara Matra Laut			
	3 Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	6.436.600	
	Calon Tamtama Matra Laut			
	4 Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	4.661.000	
	Peserta Latihan Operasi Matra TNI AL			
	5 Latihan Kematraan	1 Orang	93.611	
	6 Latihan Pasukan Khusus	1 Orang	195.354	
	7 Latihan Satuan	1 Orang	86.733	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri			
	8 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	823.633	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri			
	9 Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	138.333	
	Peserta Latihan Marinir			
	10 Latihan Perorangan Marinir	1 Orang	30.700	
	11 Latihan Teknis Marinir	1 Orang	92.000	
	12 Latihan Taktis Marinir	1 Orang	82.450	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
13	Latihan Perorangan Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	46.200	
14	Latihan Teknis Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	161.800	
15	Latihan Taktis Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	186.800	
	Peserta Diklapa			
16	Peserta Diklapa	1 Orang	3.952.000	
	Peserta Diktukpa			
17	Peserta Diktukpa	1 Orang	3.154.000	
	Peserta Diktukba			
18	Peserta Diktukba	1 Orang	3.566.000	
	Lulusan Dikma Koptar			
19	Dikma Koptar Pria	1 Orang	4.917.136	
20	Dikma Koptar Wanita	1 Orang	4.917.136	
	Lulusan Dikma Sertar			
21	Dikma Sertar Pria	1 Orang	6.666.483	
22	Dikma Sertar Wanita	1 Orang	6.666.483	
	Lulusan Dikma Sermadatar			
23	Dikma Sermadatar Pria	1 Orang	6.951.433	
24	Dikma Sermadatar Wanita	1 Orang	6.951.433	
	Lulusan Dikma Sermatutar			
25	Dikma Sermatutar Pria	1 Orang	7.296.570	
26	Dikma Sermatutar Wanita	1 Orang	7.296.570	
	Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut			
27	Diksargolan Perwira/Pa PK Matra Laut	1 Orang	5.253.108	
	Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut			
28	Dikma Bintara Pria Matra Laut	1 Orang	3.946.783	
	Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut			
29	Dikma Bintara Wanita Matra Laut	1 Orang	3.946.783	
	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut			
30	Diksargolan Bintara Matra Laut	1 Orang	3.706.216	
	Lulusan Dikma Secatam Matra Laut			
31	Dikma Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.590.500	
	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut			
32	Diksargolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.388.057	
	Lulusan Dik Seskoal			
33	Dik Seskoal	1 Orang	5.786.180	
	Lulusan Diklapa			
34	Diklapa Matra Laut	1 Orang	4.081.857	
	Lulusan Diktukpa			
35	Diktukpa Matra Laut	1 Orang	3.829.515	
	Lulusan Diktukba			
36	Diktukba Matra Laut	1 Orang	3.638.206	
	Lulusan Dikbangpers Perwira/PNS Sederajat Matra Laut			
37	Dikbangsus Perwira Matra Laut	1 Orang	4.149.335	
	Lulusan Dikbangpers Bintara/PNS Sederajat Matra Laut			
38	Dikbangsus Bintara Matra Laut	1 Orang	3.615.966	
	Lulusan Dikbangpers Tamtama/PNS Sederajat Matra Laut			
39	Dikbangsus Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.370.583	
	Lulusan Diksus Manajemen Strategik Matra Laut			
40	Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1 Orang	4.303.550	
	Lulusan Diksus Penerbang Matra Laut			
41	Diksus Penerbang Matra Laut	1 Orang	5.802.611	
	Lulusan Diksus Brevet Matra Laut			
42	Diksus Brevet Matra Laut	1 Orang	4.693.075	
	Lulusan Dik Lainnya			
43	Dik STTAL D-3	1 Orang	3.486.781	
44	Dik STTAL S-1	1 Orang	3.838.381	
45	Dik STTAL S-2	1 Orang	4.247.375	
	Peserta Kursus Manajemen Strategik			
46	Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.810.000	
47	Peserta Seskoal	1 Orang	5.101.000	
	Peserta STTAL			
48	Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.752.000	
49	Seleksi Dik S-1 STTAL	1 Orang	3.904.000	
50	Seleksi Dik S-2 STTAL	1 Orang	3.977.000	
	Peserta Dikspespa			
51	Peserta Dikspespa	1 Orang	2.771.000	
	Peserta Dikspesba			
52	Peserta Dikspesba	1 Orang	2.679.000	
	Peserta Dik Brevet			
53	Peserta Dik Brevet	1 Orang	4.345.000	
	Peserta Penerbang TNI AL			
54	Peserta Penerbang TNI AL	1 Orang	6.620.000	
	Peserta Dikspesta			
55	Peserta Dikspesta	1 Orang	2.380.000	
	Laporan Pembinaan Hukum			
56	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Laporan	50.057.000	
57	Pendapat dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Laporan	906.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer			
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Laporan	6.455.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Laporan	6.916.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Laporan	7.248.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Laporan	6.605.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Laporan	16.245.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.471.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.471.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.910.000	
66	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer	1 Laporan	906.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum			
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Laporan	13.198.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Laporan	15.092.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Laporan	16.407.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Laporan	13.739.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Laporan	52.627.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.571.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.	1 Laporan	3.508.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	6.330.000	
75	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum	1 Laporan	906.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat			
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	28.497.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	32.620.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	35.567.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	29.674.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	118.828.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	8.423.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	9.172.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	9.708.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	8.637.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	24.862.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	14.113.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	15.452.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	16.470.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	15.077.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	39.841.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	11.944.000	
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	12.747.000	
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	13.336.000	
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	12.319.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	28.663.000	
96	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/TUN Penggugat	1 Laporan	906.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat			
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	26.432.000	
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	30.931.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	34.145.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	27.717.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	124.968.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.719.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	11.593.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	12.932.000	
	105 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	10.255.000	
	106 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	50.764.000	
	107 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.756.000	
	108 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	16.845.000	
	109 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	18.398.000	
	110 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.934.000	
	111 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	56.716.000	
	112 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	14.808.000	
	113 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	17.807.000	
	114 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	19.950.000	
	115 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	15.665.000	
	116 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	80.484.000	
	117 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/TUN Tergugat Laporan Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	1 Laporan	906.000	
	118 Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 1	1 Perkara	10.090.000	
	119 Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 2	1 Perkara	10.799.000	
	120 Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 3	1 Perkara	11.618.000	
	121 Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 4	1 Perkara	11.982.000	
	122 Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Rayon 5 Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	42.411.000	
	123 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Laporan	8.800.000	
	124 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Laporan	9.450.000	
	125 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Laporan	9.900.000	
	126 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Laporan	9.040.000	
	127 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Laporan	22.000.000	
	128 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Laporan	5.973.000	
	129 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Laporan	6.310.000	
	130 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Laporan	6.535.000	
	131 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Laporan	6.063.000	
	132 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5 Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Laporan	13.060.000	
	133 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Laporan	2.180.000	
	134 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Laporan	2.330.000	
	135 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Laporan	2.430.000	
	136 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Laporan	2.220.000	
	137 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5 Pengurusan Tahanan Sementara	1 Laporan	5.355.000	
	138 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Laporan	46.975	
	139 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Laporan	48.525	
	140 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Laporan	53.575	
	141 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Laporan	48.575	
	142 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Laporan	61.625	
012.24	Markas Besar TNI AU SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Operasi Militer Selain Perang Matra Udara			
	1 Operasi Bhakti TNI	1 Kegiatan	104.907	
	Intelijen dan Pengamanan Matra Udara			
	2 Peserta Operasi Intel Taktis TNI	1 Kegiatan	378.445	
	Peserta Latihan Kematraan			
	3 Peserta Latihan Kematraan	1 Kegiatan	86.714	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri			
	4 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Kegiatan	7.095.274	
	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri			
	5 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Kegiatan	169.446	
	Peserta Sesko Matra Udara			
	6 Seleksi Seskoau dan Sessau Matra Udara	1 orang	2.561.700	
	Peserta Sekkau			
	7 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 orang	1.756.200	
	Peserta Setukpa			
	8 Seleksi Setukpa Matra udara	1 orang	1.587.060	
	Peserta Setukba			
	9 Seleksi Setukba Matra Udara	1 orang	1.363.620	
	Lulusan Dikma Sertar			
	10 Sertar Pria	1 orang	6.060.560	
	11 Sertar Wanita	1 orang	6.060.560	
	Lulusan Dikma Sermadakar			
	12 Pendidikan Sermadatar Pria	1 orang	6.294.903	
	13 Pendidikan Sermadatar Wanita	1 orang	6.294.903	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Lulusan Dikma Sermatutar			
14	Pendidikan Sermatutar Pria	1 orang	6.682.076	
15	Pendidikan Sermatutar Wanita	1 Orang	6.682.076	
	Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara			
16	Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara	1 Orang	5.478.210	
	Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara			
17	Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara			
18	Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara			
19	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD	1 Orang	3.304.941	
20	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD	1 Orang	3.304.941	
	Lulusan Dikma Secatam Matra Udara			
21	Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara	1 Orang	2.943.610	
	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara			
22	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara	1 Orang	3.005.358	
	Lulusan Dikma Sekbang/Seknav			
23	Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara	1 Orang	7.054.322	
24	Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara Lanjutan	1 Orang	7.054.323	
	Lulusan Dikma SIN/SIP			
25	Pendidikan SIP/SIN Matra Udara	1 Orang	6.973.188	
	Lulusan SESKOA			
26	Pendidikan SESKOA	1 Orang	5.064.263	
27	Pendidikan SESSAU	1 Orang	4.910.030	
	Lulusan SEKKAU			
28	Pendidikan SEKKAU	1 Orang	3.886.550	
29	Pendidikan SUSPAJEMEN	1 Orang	3.847.000	
	Lulusan SETUKPA			
30	Pendidikan SETUKPA	1 Orang	3.642.843	
	Lulusan SETUKBA			
31	Pendidikan SETUKBA	1 Orang	3.390.143	
	Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Udara			
32	Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	3.612.758	
	Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Udara			
33	Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 Orang	3.027.750	
	Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Udara			
34	Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.933.208	
	Peserta Dikbangspes Perwira			
35	Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	813.120	
	Peserta Dikbangspes Bintara/Tamtama			
36	Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara	1 Orang	699.920	
	Lulusan Dikma Koptar			
37	Koptar Pria	1 Orang	5.159.750	
38	Koptar Wanita	1 Orang	5.159.750	
	Calon Karbol			
39	Werving Taruna/Taruni	1 Orang	25.695.798	
	Calon Bintara Matra Udara			
40	Werving Bintara Matra Udara	1 Orang	6.422.172	
	Calon Tamtama Matra Udara			
41	Werving Tamtama Matra Udara	1 Orang	4.650.940	
	Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit			
42	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Kegiatan	8.800.000	
43	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Kegiatan	9.450.000	
44	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Kegiatan	9.900.000	
45	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Kegiatan	9.040.000	
46	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Kegiatan	22.000.000	
47	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Kegiatan	5.973.000	
48	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Kegiatan	6.310.000	
49	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Kegiatan	6.535.000	
50	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Kegiatan	6.063.000	
51	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Kegiatan	13.060.000	
	Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit			
52	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Kegiatan	2.180.000	
53	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Kegiatan	2.330.000	
54	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Kegiatan	2.430.000	
55	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Kegiatan	2.220.000	
56	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Kegiatan	5.355.000	
	Pengurusan Tahanan Sementara			
57	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Kegiatan	46.975	
58	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Kegiatan	48.525	
59	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Kegiatan	53.575	
60	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Kegiatan	48.575	
61	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Kegiatan	61.625	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer			
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk I Rayon 1	1 Kegiatan	6.455.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	6.916.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	7.248.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	6.605.000	
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	16.245.000	
67	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk Banding	1 Kegiatan	2.471.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk Kasasi	1 Kegiatan	2.471.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk PK	1 Kegiatan	2.910.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum			
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 1	1 Kegiatan	13.198.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 2	1 Kegiatan	15.092.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 3	1 Kegiatan	16.407.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 4	1 Kegiatan	13.739.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I Rayon 5	1 Kegiatan	52.627.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk Banding	1 Kegiatan	4.571.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk	1 Kegiatan	3.508.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum TK PK	1 Kegiatan	6.330.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat			
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 1	1 Kegiatan	28.497.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 2	1 Kegiatan	32.620.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 3	1 Kegiatan	35.567.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 4	1 Kegiatan	29.674.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 5	1 Kegiatan	118.828.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 1	1 Kegiatan	8.423.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 2	1 Kegiatan	9.172.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 3	1 Kegiatan	9.708.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 4	1 Kegiatan	8.637.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk Banding Rayon 5	1 Kegiatan	24.862.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 1	1 Kegiatan	14.113.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 2	1 Kegiatan	15.452.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 3	1 Kegiatan	16.470.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 4	1 Kegiatan	15.077.000	
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Kasasi Rayon 5	1 Kegiatan	39.841.000	
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 1	1 Kegiatan	11.944.000	
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 2	1 Kegiatan	12.747.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 3	1 Kegiatan	13.336.000	
96	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 4	1 Kegiatan	12.319.000	
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk Pk Rayon 5	1 Kegiatan	28.663.000	
	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat			
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 1	1 Kegiatan	26.432.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 2	1 Kegiatan	30.931.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 3	1 Kegiatan	34.145.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 4	1 Kegiatan	27.717.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 5	1 Kegiatan	124.968.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 1	1 Kegiatan	9.719.000	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 2	1 Kegiatan	11.593.000	
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 3	1 Kegiatan	12.932.000	
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 4	1 Kegiatan	10.255.000	
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk Banding Rayon 5	1 Kegiatan	50.764.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	108 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 1	1 Kegiatan	14.756.000	
	109 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 2	1 Kegiatan	16.845.000	
	110 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 3	1 Kegiatan	18.398.000	
	111 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 4	1 Kegiatan	15.934.000	
	112 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 5	1 Kegiatan	56.716.000	
	113 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk PK Rayon 1	1 Kegiatan	14.808.000	
	114 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk PK Rayon 2	1 Kegiatan	17.807.000	
	115 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk PK Rayon 3	1 Kegiatan	19.950.000	
	116 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk PK Rayon 4	1 Kegiatan	15.665.000	
	117 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/Tun Termohon Tk PK Rayon 5	1 Kegiatan	80.484.000	
	Pendapat dan Saran Hukum			
	118 Pendapat dan Saran Hukum Pidana	1 Kegiatan	906.000	
	119 Pendapat dan Saran Hukum Perdata	1 Kegiatan	906.000	
	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi			
	120 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1	1 Perkara	10.090.000	
	121 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2	1 Perkara	10.799.000	
	122 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3	1 Perkara	11.618.000	
	123 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4	1 Perkara	11.982.000	
	124 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5	1 Perkara	42.411.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.05	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Pembinaan UPT Pemasyarakatan			
	1 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah DKI Jakarta	19 UPT	372.006.000	
	2 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Barat	40 UPT	838.248.000	
	3 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah	59 UPT	1.100.260.000	
	4 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur	52 UPT	1.089.517.000	
	5 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di D.I Yogyakarta	15 UPT	713.476.000	
	6 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bali	14 UPT	768.568.000	
	7 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Banten	14 UPT	588.480.000	
	8 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Aceh	29 UPT	739.508.000	
	9 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara	42 UPT	928.280.000	
	10 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Barat	26 UPT	690.536.000	
	11 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Jambi	14 UPT	650.682.000	
	12 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Riau	20 UPT	626.064.000	
	13 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bengkulu	10 UPT	525.776.000	
	14 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Selatan	24 UPT	647.228.000	
	15 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Lampung	21 UPT	537.830.000	
	16 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bangka Belitung	9 UPT	504.432.000	
	17 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kepulauan Riau	11 UPT	610.732.000	
	18 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Barat	18 UPT	576.568.000	
	19 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Tengah	16 UPT	557.438.000	
	20 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Selatan	17 UPT	577.874.000	
	21 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Timur	16 UPT	688.462.000	
	22 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Maluku	17 UPT	760.716.000	
	23 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Maluku Utara	12 UPT	722.504.000	
	24 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Papua	14 UPT	1.163.880.000	
	25 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Papua Barat	11 UPT	993.096.000	
	26 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Utara	16 UPT	608.637.000	
	27 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Tengah	15 UPT	773.862.000	
	28 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara	11 UPT	614.340.000	
	29 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Sulawesi Selatan	28 UPT	805.852.000	
	30 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Barat	9 UPT	597.044.000	
	31 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Gorontalo	7 UPT	558.584.000	
	32 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah NTB	13 UPT	641.586.000	
	33 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah NTT	21 UPT	674.076.000	
	Layanan Pembinaan Narapidana			
	34 Pembinaan Kemandirian Narapidana (Vol = 20 Napi)	20 Narapidana	38.300.000	
	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan			
	35 Kegiatan Rehabilitasi Sosial di Lapas dan Rutan (Vol = 10 Napi)	10 Narapidana/	32.780.000	
	36 Kegiatan Rehabilitasi Medis di Lapas dan Rutan (Vol = Per 10 Napi)	10 Narapidana/	26.400.000	
	Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan			
	37 Kegiatan Pasca Rehabilitasi di Bapas (Vol = 10 Klien)	10 Klien	14.700.000	
	Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak			
	38 Pelatihan Keterampilan Anak (Vol = Per 20 Anak)	20 Anak	23.300.000	
	39 Pembinaan Kepribadian Anak (Vol = 20 Anak)	20 Anak	23.300.000	
	40 Pengasuh Pemasyarakatan (Vol = Per 20 Anak)	20 Anak	17.920.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Tindak Lanjut Mou			
	41 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Mou	1 Dokumen	30.666.000	
	Kebijakan Dan Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik			
	42 Rekomendasi Penegakan Kode Etik	1 Dokumen	5.880.000	
	Pembinaan Layanan Pengaduan Dan Intelijen			
	43 Penyelesaian Pengaduan	1 UPT	10.824.000	
	Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan			
	44 Pembimbingan dan Pengawasan Oleh Bapas (Vol = 1 Klien)	1 Klien	2.625.000	
	45 Pendampingan Peradilan Anak (Vol = Per Anak)	1 Klien	2.025.000	
	46 Rekomendasi Program Pelayanan dan Pembinaan oleh Bapas	1 Klien	975.000	
013.06	Direktorat Jenderal Imigrasi SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Produk Intelijen Keimigrasian			
	1 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi	1 Laporan	65.760.000	
	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian			
	2 Operasi Mandiri	1 LHK	65.070.000	
	3 Operasi Gabungan	1 LHK	80.170.000	
	4 Penyidikan Keimigrasian	1 LHK	109.688.000	
	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian			
	5 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Barat	1 LHK	30.657.000	
	6 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Tengah	1 LHK	37.916.000	
	7 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Timur	1 LHK	42.544.000	
	8 Operasi Mandiri di Wilayah Barat	1 LHK	35.793.000	
	9 Operasi Mandiri di Wilayah Tengah	1 LHK	45.725.000	
	10 Operasi Mandiri di Wilayah Timur	1 LHK	52.228.000	
	11 Operasi Gabungan di Wilayah Barat	1 LHK	62.133.000	
	12 Operasi Gabungan di Wilayah Tengah	1 LHK	75.827.000	
	13 Operasi Gabungan di Wilayah Timur	1 LHK	88.854.000	
	14 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat	1 LHK	69.794.000	
	15 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Tengah	1 LHK	102.200.000	
	16 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur	1 LHK	123.142.000	
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1 Orang	8.000.000	
	2 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Kegiatan	10.670.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.12	<p>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</p> <p>Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya</p> <p>1 Penyelenggaraan Diklat SPPA Bagi APGAKUM</p> <p>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</p> <p>Lulusan Taruna Ilmu Pemasayarakatan</p> <p>2 Pendidikan Taruna Tk. I</p> <p>3 Pendidikan Taruna Tk. II</p> <p>4 Pendidikan Taruna Tk. III</p> <p>5 Pendidikan Taruna Tk. IV</p> <p>Lulusan Peserta Didik Keimigrasian</p> <p>6 Pendidikan Taruna Tk. I</p> <p>7 Pendidikan Taruna Tk. II</p> <p>8 Pendidikan Taruna Tk. III</p> <p>9 Pendidikan Taruna Tk. IV</p>	<p>270 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p>	<p>2.962.525.000</p> <p>30.567.112</p> <p>27.019.694</p> <p>27.474.679</p> <p>29.942.740</p> <p>30.556.790</p> <p>27.650.383</p> <p>28.246.097</p> <p>31.225.698</p>	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama BLU			
	1 Pendidikan Program Diploma I Kerjasama	1 Kegiatan	638.767.000	
	2 Pendidikan Program Diploma III Kerjasama	1 Kegiatan	1.443.203.000	
	3 Pelatihan 3 Hari	1 Kegiatan	69.800.000	
	4 Pelatihan 5 Hari	1 Kegiatan	103.792.000	
	5 Pelatihan 10 Hari	1 Kegiatan	190.123.000	
	6 Pelatihan 15 Hari	1 Kegiatan	290.170.000	
	7 Pelatihan 30 Hari	1 Kegiatan	546.086.000	
	8 Pelatihan 60 Hari	1 Kegiatan	1.061.002.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama BLU			
	9 Ujian Saringan Masuk Pendidikan Program Diploma Reguler	1 Kegiatan	308.899	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Data dan Informasi			
	1 Publikasi Statistik Pertanian	1 Layanan	194.870.000	
018.02	Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	256 Rekomendasi	2.142.128.000	
	2 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	180 Rekomendasi	2.147.028.000	
	3 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Reviu SAKIP Kementerian	20 Rekomendasi	148.632.000	
	4 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Laporan Keuangan Kementerian	222 Rekomendasi	998.325.000	
	5 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	256 Rekomendasi	2.133.728.000	
	6 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	180 Rekomendasi	2.147.028.000	
	7 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10 Rekomendasi	73.560.000	
	8 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	156 Rekomendasi	328.350.000	
	9 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	256 Rekomendasi	2.142.128.000	
	10 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	180 Rekomendasi	2.147.028.000	
	11 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	15 Rekomendasi	100.740.000	
	12 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	204 Rekomendasi	475.650.000	
	13 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	256 Rekomendasi	2.265.578.000	
	14 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	180 Rekomendasi	2.138.328.000	
	15 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	15 Rekomendasi	80.280.000	
	16 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	129 Rekomendasi	438.120.000	
	17 Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	250 Rekomendasi	4.383.904.000	
018.03	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Penerapan Penanganan DPI			
	1 Pembuatan Lubang Biopori	1 Hektar	4.425.000	
	2 Pembuatan Lubang Biopori Wilayah Remote	1 Hektar	4.935.000	
	3 Pembuatan Sumur Pantek	1 Hektar	5.466.100	
	4 Pembuatan Sumur Pantek Wilayah Remote	1 Hektar	6.711.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.04	Direktorat Jenderal Hortikultura			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	GAP Sayuran dan Tanaman Obat			
	1 GAP Sayuran dan Tanaman Obat	1 Kelompok	41.000.000	
	GHP Hortikultura			
	2 GHP Hortikultura	1 Kelompok	41.400.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Penerapan PHT (PPHT)			
	3 Penerapan PHT Wilayah Barat	1 Kelompok	43.000.000	
	4 Penerapan PHT Wilayah Timur	1 Kelompok	45.000.000	
	GAP Buah dan Florikultura			
	5 GAP Buah	1 Kelompok	48.000.000	
	6 GAP Florikultura	1 Kelompok	48.000.000	
018.08	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Irigasi Perpompaaan			
	1 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Timur	1 Unit	165.000.000	
	2 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Timur	1 Unit	128.000.000	
	3 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Timur	1 Unit	105.000.000	
	4 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah	1 Unit	140.000.000	
	5 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Tengah	1 Unit	105.000.000	
	6 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Tengah	1 Unit	85.000.000	
	7 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	1 Unit	127.000.000	
	8 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat	1 Unit	95.000.000	
	9 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Barat	1 Unit	76.000.000	
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	VUB Bibit Tebu (Budset)			
	1 VUB Bibit Tebu (Budset)	500.000 Budset	167.670.000	
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan			
	2 Bahan Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi	258.750.000	
	Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi			
	3 Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi	100 Jenis	231.742.000	
	Bibit Sumber Ternak Unggulan			
	4 Ayam SenSi-1 Agrinak	32.000 Ekor	285.375.000	
	5 Bibit Unggul Ternak Itik Pedaging	50.990 Ekor	399.846.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Sumber Daya Genetik Yang Terkarakterisasi, Terevaluasi, dan Terdokumentasi			
	6 Karakterisasi Molekuler SDG Tanaman Pangan	1 Aksesori	500.062	
	Benih Padi			
	7 Produksi Benih Penjenis (BS) Padi	1 Ton	33.356.000	
	8 Produksi Benih Dasar (FS) Padi	1 Ton	21.455.000	
	9 Produksi Benih Pokok (SS) Padi	1 Ton	15.526.000	
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian			
	1 Pelatihan Komoditas Perkebunan 3 Hari	1 Orang	1.528.000	
	2 Pelatihan Komoditas Perkebunan 5 Hari	1 Orang	2.180.000	
	3 Pelatihan Komoditas Perkebunan 7 Hari	1 Orang	4.344.200	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	4 Pelatihan Komoditas Tanaman Pangan 7 Hari	1 Orang	6.344.200	
	5 Pelatihan Komoditas Tanaman Pangan 5 Hari	1 Orang	2.280.000	
	6 Pelatihan Komoditas Tanaman Pangan 3 Hari	1 Orang	1.490.000	
	7 Pelatihan Tematik Peternakan 3 Hari	1 Orang	1.471.666	
	8 Pelatihan Tematik Peternakan 5 Hari	1 Orang	2.148.333	
	9 Pelatihan Manajemen Kelembagaan Tani	1 Orang	3.959.200	
	10 Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan 14 Hari	1 Orang	7.874.533	
	11 Pelatihan Tematik Peternakan 7 Hari	1 Orang	6.217.533	
	12 Pelatihan Manajemen UPJA	1 Orang	3.885.866	
	13 Pelatihan Alsintan (30 orang; 3 Hari)	1 Orang	1.538.333	
	14 Pelatihan Alsintan (30 orang; 5 Hari)	1 Orang	2.025.000	
	15 Pelatihan Alsintan (30 orang; 7 Hari)	1 Orang	5.900.866	
	16 Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan 21 Hari	1 Orang	9.325.400	
	17 Pelatihan Komoditas Hortikultura (5 Hari; 30 Orang; 1 Angk)	1 Orang	2.060.000	
	18 Pelatihan Komoditas Hortikultura (3 Hari; 30 Orang; 1 Angk)	1 Orang	1.490.000	
	19 Pelatihan Komoditas Hortikultura (7 Hari; 30 Orang; 1 Angk)	1 Orang	6.344.200	
	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian			
	20 Sertifikasi Profesi SDM Tanaman Pangan	1 Orang	3.215.066	
	21 Sertifikasi Profesi Perkebunan	1 Orang	3.215.066	
	22 Sertifikasi Profesi SDM Peternakan	1 Orang	3.355.066	
	23 Sertifikasi Profesi Hortikultura	1 Orang	3.215.066	
	24 Sertifikasi Profesi Alsintan	1 Orang	3.215.066	
	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani			
	25 Penumbuhan Kewirausahaan Petani Muda Milenial Tanaman Pangan	1 Unit	60.000.000	
	26 Penumbuhan Kewirausahaan Petani Milenial Bidang Perkebunan	1 Unit	60.000.000	
	27 Penumbuhan Kewirausahaan Petani Milenial Bidang Hortikultura	1 Unit	60.000.000	
	28 Penumbuhan Kewirausahaan Petani Milenial Bidang Peternakan	1 Unit	60.000.000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani			
	29 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Menuju Korporasi Petani	1 Unit	100.000.000	
	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian			
	30 Diploma IV Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	1 Orang	30.078.571	
	31 Diploma IV Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi	1 Orang	30.528.771	
	32 Diploma IV Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	1 Orang	30.614.285	
	33 Diploma IV Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	1 Orang	28.005.971	
	34 Diploma IV Prodi Agribisnis Hortikultura	1 Orang	24.278.285	
	35 Diploma IV Prodi Teknologi Benih	1 Orang	27.841.428	
	36 Diploma IV Prodi Teknologi Pakan Ternak	1 Orang	23.042.714	
	37 Diploma IV Prodi Teknologi Produksi Ternak	1 Orang	22.748.400	
	38 Diploma IV Prodi Agribisnis Peternakan	1 Orang	27.421.428	
	39 Diploma IV Prodi Teknologi Rekayasa Pangan	1 Orang	26.531.428	
	40 Diploma IV Prodi Sains Perkopian	1 Orang	26.113.971	
	41 Diploma III Prodi Reproduksi dan Kesehatan Hewan	1 Orang	28.044.285	
	42 Diploma III Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian	1 Orang	28.248.000	
	43 Diploma III Prodi Kesehatan Hewan	1 Orang	28.977.857	
	44 Diploma III Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura	1 Orang	24.793.457	
	45 Diploma III Prodi Budidaya Ternak	1 Orang	26.272.685	
	46 Diploma III Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan	1 Orang	29.110.285	
	47 Diploma III Prodi Teknologi Hasil Pertanian	1 Orang	24.157.228	
	48 Diploma III Prodi Usaha Budidaya Ternak	1 Orang	23.938.828	
	49 Diploma III Prodi Budidaya Pertanian Lahan Kering	1 Orang	24.671.400	
	50 Diploma III Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Ternak	1 Orang	24.948.542	
	51 Diploma III Prodi Teknologi Hasil Perkebunan	1 Orang	28.220.114	
018.12	Badan Karantina Pertanian			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati			
	1 Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaaan	1 Uji Terap	146.016.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
023.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Perfilman 1 Rekomendasi Kebijakan Teknis Perizinan Perfilman	5 Dokumen	314.950.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
024.05	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB			Kegiatan analisa data pasif B/BTKLPP dari minimal 2 (dua) jenis contoh uji pada periode tertentu tahun berjalan yang dilaporkan tiap semester secara tidak kumulatif dalam rangka sistem kewaspadaan dini munculnya penyakit potensial KLB
	1 Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium (B/BTKLPP)	1 Layanan	38.900.000	Layanan yang dilakukan di luar jam kerja/hari libur. Layanan dengan melakukan pemeriksaan kapal posisi kapal labuh/bersandar diluar jam kerja. Kegiatan rujukan minimal 8 jam. Layanan Sitkus minimal 8 jam di satu lokasi
	Layanan Kekarantinaan Kesehatan			
	2 Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	1 Layanan	480.000	
	3 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (<i>Certificate of Pratique</i>)	1 Layanan	550.000	
	4 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan	1 Layanan	600.000	
	5 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	1 Layanan	600.000	
	6 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan PHOC (<i>Port Health Quarantine Clearance</i>)	1 Layanan	400.000	
	7 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	1 Layanan	800.000	
	8 Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	1 Layanan	200.000	
	9 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	1 Layanan	155.000	
	10 Layanan Pemeriksaan P3K Pesawat	1 Layanan	155.000	
	11 Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus	1 Layanan	1.455.000	
	12 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Khusus Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional	1 Layanan	2.000.000	
	13 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan Kategori 1	1 Layanan	945.000	
	14 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan Kategori 2	1 Layanan	895.000	
	Layanan Capaian Eliminasi Malaria			IRS dilakukan pada seluruh rumah di desa endemis malaria tinggi API>5 per 1000. Survey mencakup minimal 80% penduduk di satu desa/wilayah. 1 layanan sediaan darah = pembiayaan 50 sediaan darah.
	15 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah)	1 Layanan	26.300.000	
	16 Sediaan Darah Mikroskop Malaria yang diuji Silang (% sensitivitas, spesifitas, akurasi spesies)	1 Layanan	500.000	
	17 Survei Darah Massal Malaria (Angka <i>Parasite Rate</i>)	1 Layanan	10.000.000	
	18 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah) Daerah Sulit Kategori I (Daerah Sulit selain Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	36.300.000	
	19 Survei Darah Massal Malaria (Angka <i>Parasite Rate</i>) untuk Daerah Sulit	1 Layanan	17.000.000	
	20 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida Pada Dinding Rumah) Daerah Sulit Kategori II (Daerah Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	43.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit			Survey dan pengendalian malaria dan DBD untuk wilayah 1 HA. Survey dan pengendalian vektor Diare per lokasi pengendalian. Survei PES untuk 4 hari pelaksanaan Kegiatan.
	21 Layanan Pengendalian Vektor DBD	1 Layanan	1.061.000	
	22 Layanan Survey Vektor PES	1 Layanan	2.573.000	
	23 Layanan Pengendalian Diare	1 Layanan	433.000	
	24 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	1 Layanan	1.233.000	
	25 Layanan Survey Vektor DBD	1 Layanan	320.000	
	26 Layanan Survey Vektor Diare	1 Layanan	320.000	
	27 Layanan Survey Vektor Malaria	1 Layanan	1.673.000	
	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS			Layanan P2P HIV AIDS di KKP terdiri dari biaya untuk pemeriksaan VCT dengan target 100 tes dan biaya operasional digunakan untuk petugas fasyankes.
	28 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	1 Layanan	3.025.000	
	Layanan Pengendalian Penyakit TBC			Layanan deteksi dini Terduga TBC di KKP terdiri dari biaya untuk pengadaan bahan kesehatan dengan target 50 orang dan biaya operasional digunakan untuk petugas fasyankes.
	29 Layanan Pemeriksaan TB Resisten Obat dengan Metode Biakan/Kultur/Kepekaan Obat	1 Layanan	450.000	
	30 Layanan Deteksi Dini Terduga TBC Wilayah Kerja KKP	1 Layanan	4.555.000	
	31 Layanan Transport Sputum TBC dalam Kab/Kota	1 Layanan	75.000	
	32 Layanan Transport Sputum TBC Wilayah Jawa & Bali	1 Layanan	175.000	
	33 Layanan Transport Sputum TBC Wilayah Sulawesi, Gorontalo, NTB & NTT	1 Layanan	275.000	
	34 Layanan Transport Sputum TBC Wilayah Maluku & Papua	1 Layanan	375.000	
	35 Layanan Transport Sputum TBC Wilayah Sumatera dan Kalimantan	1 Layanan	200.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
025.02	Inspektorat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Audit Internal 1 Laporan Hasil Audit Investigasi Wilayah DKI Jakarta 2 Laporan Hasil Audit Investigasi Dalam Pulau Jawa (Luar DKI) 3 Laporan Hasil Audit Investigasi Wilayah Luar Pulau Jawa	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan	19.075.000 96.964.000 139.674.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.11	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial SBK Total Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Komunitas yang mendapatkan Layanan Penyuluhan Sosial			
	1 Penyuluhan Sosial Keliling Penyelenggaraan Program Kesos	10 Komunitas	284.384.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) SDM yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial			
	2 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	11.246.800	
	3 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	10.384.000	
	4 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	17.945.133	
	5 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	9.145.866	
	6 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	7.570.000	
	7 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (50 JPL/6 Hari)	1 Orang	7.029.266	
	8 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (165 JPL/10 Hari)	1 Orang	13.432.666	
	9 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	17.067.200	
	10 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	10.954.333	
	11 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	9.586.000	
	12 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	8.839.466	
	13 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	6.651.566	
	14 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	16.789.966	
	15 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (120 JPL/15 Hari)	1 Orang	10.371.033	
	16 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	9.065.766	
	17 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	8.300.433	
	18 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	6.805.833	
	19 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	17.513.366	
	20 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	13.319.900	
	21 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	12.504.633	
	22 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	11.536.033	
	23 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	9.762.466	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	24 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makassar (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	18.488.066	
	25 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makassar (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	11.555.933	
	26 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makassar (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	10.639.000	
	27 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makassar (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	9.702.066	
	28 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makassar (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	8.744.466	
	29 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	30.380.700	
	30 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	18.812.300	
	31 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	16.673.700	
	32 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (80 JPL/12 Hari)	1 Orang	15.648.433	
	33 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	12.372.833	
	34 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (50 JPL/6 Hari)	1 Orang	11.746.033	
	Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat			
	35 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (165 JPL/18 Hari)	1 Orang	11.899.166	
	36 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	10.211.250	
	37 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	13.277.333	
	38 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	9.635.500	
	39 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Makassar (165 JPL/22 Hari)	1 Orang	9.664.800	
	40 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	20.335.266	
	SDM Kesejahteraan Sosial yang Telah Dikembangkan Profesinya			
	41 Peksos yang Telah Mendapatkan Sertifikasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Akreditasi	1 Orang	2.052.060	
	42 Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	1 Lembaga	3.078.053	
	43 Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial	1 Mahasiswa	5.805.748	
	44 Mahasiswa Program Studi Magister Terapan Pekerjaan Sosial	1 Mahasiswa	20.476.850	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
032.02	Inspektorat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I			
	1 Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I	1 Laporan	1.431.660.000	
	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II			
	2 Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II	1 Laporan	1.910.660.000	
	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III			
	3 Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat III	1 Laporan	1.960.660.000	
	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV			
	4 Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat IV	1 Laporan	1.600.160.000	
032.04	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Produksi Induk Unggul			
	1 Calon Induk Unggul Ikan Mas	1 Ekor	26.808	
	2 Calon Induk Unggul Ikan Gurame	1 Ekor	45.120	
	3 Calon Induk Unggul Ikan Patin	1 Ekor	38.243	
	4 Calon Induk Unggul Ikan Nila	1 Ekor	17.110	
	5 Calon Induk Unggul Ikan Lele	1 Ekor	40.231	
	6 Calon Induk Unggul Udang <i>Marguensis</i> / Pisang	1 Ekor	35.662	
	7 Calon Induk Unggul Udang Windu	1 Ekor	102.075	
	8 Calon Induk Unggul Udang Vanamae	1 Ekor	38.916	
	9 Calon Induk Unggul Ikan Kerapu	1 Ekor	343.575	
	10 Calon Induk Unggul Ikan Bawal Bintang	1 Ekor	308.681	
	11 Calon Induk Unggul Ikan Kakap Putih	1 Ekor	321.202	
	12 Calon Induk Unggul Ikan Bubara	1 Ekor	328.314	
	13 Calon Induk Unggul Ikan Bandeng	1 Ekor	94.718	
	14 Calon Induk Ikan Jelawat	1 Ekor	53.110	
	15 Calon Induk Unggul Ikan Kakap Merah	1 Ekor	328.512	
	16 Calon Induk Unggul Ikan Cobia	1 Ekor	264.348	
	17 Calon Induk Unggul Ikan Hias	1 Ekor	113.970	
	Benih Bermutu Ikan Air Tawar Yang Didistribusikan ke Masyarakat			
	18 Benih Ikan Nila	1 Ekor	244	
	19 Benih Mas	1 Ekor	230	
	20 Benih Gurame	1 Ekor	1.417	
	21 Benih Patin	1 Ekor	348	
	22 Benih Ikan Lele	1 Ekor	305	
	23 Benih Ikan Nilem	1 Ekor	255	
	24 Benih Udang Galah	1 Ekor	105	
	25 Benih Ikan Papuyu	1 Ekor	213	
	26 Benih Ikan Jelawat	1 Ekor	272	
	27 Benih Ikan Tawes	1 Ekor	228	
	28 Benih Ikan Hias	1 Ekor	484	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Benih Bermutu Ikan Air Payau yang Didistribusikan ke Masyarakat			
	29 Benih Udang <i>Merguenses</i> (putih)	1 Ekor	38	
	30 Benih Udang Windu	1 Ekor	46	
	31 Benih <i>Vanamei</i>	1 Ekor	40	
	32 Benih Ikan Bandeng	1 Ekor	172	
	33 Benih Ikan Nila Salin	1 Ekor	176	
	34 Benih Kepiting	1 Ekor	622	
	Benih Bermutu Ikan Air Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat			
	35 Benih Ikan Kerapu	1 Ekor	8.916	
	36 Benih Ikan Bawal Bintang	1 Ekor	5.543	
	37 Benih Ikan Kakap Putih	1 Ekor	4.631	
	38 Benih Ikan Bubara	1 Ekor	5.545	
	39 Benih Ikan Hias	1 Ekor	1.906	
	40 Benih Kakap Merah	1 Ekor	6.949	
	41 Benih Cobia	1 Ekor	6.876	
	Bibit Rumput Laut Yang Didistribusikan ke Masyarakat			
	42 Bibit Rumput Laut	1 Kg	27.888	
	Sampel yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan			
	43 Sampel Obat dan Residu	1 Sampel	880.250	
	44 Sampel Kualitas Air	1 Sampel	182.894	
	45 Sampel Patologi	1 Sampel	519.224	
	46 Sampel Mikrobiologi	1 Sampel	874.127	
	47 Sampel Nutrisi Pakan	1 Sampel	467.045	
	Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan Operasional Budidaya di UPT			
	48 Pakan Apung	1 Kg	9.495	
	49 Pakan Tenggelam	1 Kg	8.735	
032.05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Kompeten			
	1 PPNS Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	1.542.855.000	
	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten			
	2 Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten	60 Orang	2.228.896.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat			
	3 Operasional Speed Boat 6,5 Meter	1 Hari Operasi	1.072.000	
	4 Operasional Speed Boat 8 Meter	1 Hari Operasi	2.724.000	
	5 Operasional Speed Boat 12 Meter (Bensin)	1 Hari Operasi	5.837.000	
	6 Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar)	1 Hari Operasi	5.477.000	
	7 Operasional Speed Boat 16	1 Hari Operasi	6.977.000	
	8 Operasional Rigid Inflatable Boat	1 Hari Operasi	4.563.000	
	9 Operasional Rubber Boat	1 Hari Operasi	631.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Disidik Secara Akuntabel			
	10 Permemberkasn Perkara TPKP Mudah	1 Kasus	20.625.000	
	11 Permemberkasn Perkara TPKP Sedang	1 Kasus	28.625.000	
	12 Permemberkasn Perkara TPKP Sulit	1 Kasus	49.275.000	
	13 Permemberkasn Perkara TPKP Sangat Sulit	1 Kasus	66.425.000	
	Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Ditangani Secara Akuntabel			
	14 Penanganan Barang Bukti Kapal TPKP	1 Kasus	32.024.000	
	15 Penanganan Awak Kapal TPKP	1 Kasus	47.070.000	
032.12	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih			
	1 Pelatihan Masyarakat melalui Safari Pelatihan di Wilayah I	1 Orang	3.196.500	
	2 Pelatihan Masyarakat melalui Safari Pelatihan di Wilayah II	1 Orang	3.421.500	
	3 Pelatihan Masyarakat melalui Safari Pelatihan di Wilayah III	1 Orang	3.759.000	
	4 Pelatihan Masyarakat di Balai Pelatihan	1 Orang	3.769.000	
	5 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Pemagangan Wilayah I	1 Orang	7.550.000	
	6 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Pemagangan Wilayah II	1 Orang	8.910.000	
	7 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Pemagangan Wilayah III	1 Orang	10.520.000	
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi			
	8 Sertifikasi Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan di LSP 1	1 Orang	510.000	
	9 Sertifikasi Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan di LSP 3	1 Orang	735.000	
	Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Kompeten			
	10 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyidik Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Orang	13.627.500	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
054.01	Badan Pusat Statistik			
	SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Layanan Audit Internal I	38 Layanan	3.061.479.000	
	2 Layanan Audit Internal II	38 Layanan	3.166.518.000	
	3 Layanan Audit Internal III	38 Layanan	3.369.846.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan			
	4 Diklat Teknis Substansi	1 Layanan	8.432.942	
	5 Diklat Fungsional	1 Layanan	17.559.492	
	6 Standardisasi dan Sertifikasi	1 Layanan	7.616.873	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
056.01	Sekretariat Jenderal			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Peta Bidang Tanah			
	1 Peta Bidang Tanah (ASN) Kategori I	1 Bidang	302.420	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	2 Peta Bidang Tanah (ASN) Kategori II	1 Bidang	256.900	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Kep.Bangka Belitung
	3 Peta Bidang Tanah (ASN) Kategori III	1 Bidang	212.700	Sulbar, Sulsel, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	4 Peta Bidang Tanah (ASN) Kategori IV	1 Bidang	164.620	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	5 Peta Bidang Tanah (ASN) Kategori V	1 Bidang	115.220	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
	6 Peta Bidang Tanah (ASN) Kategori VI	1 Bidang	314.900	Kepulauan
	7 Peta Bidang Tanah (Pihak Ketiga) Kategori I	1 Bidang	418.817	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara
	8 Peta Bidang Tanah (Pihak Ketiga) Kategori II	1 Bidang	392.111	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Kep.Bangka Belitung
	9 Peta Bidang Tanah (Pihak Ketiga) Kategori III	1 Bidang	292.946	Sulbar, Sulsel, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	10 Peta Bidang Tanah (Pihak Ketiga) Kategori IV	1 Bidang	227.163	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	11 Peta Bidang Tanah (Pihak Ketiga) Kategori V	1 Bidang	177.422	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
	12 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan ASN) Kategori I	1 Bidang	315.980	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	13 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan ASN) Kategori II	1 Bidang	279.040	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Kep.Bangka Belitung

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	14 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan ASN) Kategori III	1 Bidang	243.160	Sulbar, Sulsel, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	15 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan ASN) Kategori IV	1 Bidang	204.140	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	16 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan ASN) Kategori V	1 Bidang	166.160	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I.Yogyakarta, Jatim, Bali
	17 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan ASN) Kategori VI	1 Bidang	354.600	Kepulauan
	18 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga) Kategori I	1 Bidang	486.877	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	19 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga) Kategori II	1 Bidang	423.103	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Kep.Bangka Belitung
	20 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga) Kategori III	1 Bidang	360.161	Sulbar, Sulsel, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	21 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga) Kategori IV	1 Bidang	294.193	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	22 Peta Bidang Tanah (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga) Kategori V	1 Bidang	228.499	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
	Sertipikat Hak Atas Tanah			
	23 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori I (ASN)	1 Bidang	255.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	24 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori II (ASN)	1 Bidang	222.100	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Kep.Bangka Belitung
	25 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori III (ASN)	1 Bidang	190.140	Sulbar, Sulsel, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	26 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV (ASN)	1 Bidang	155.360	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	27 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori V (ASN)	1 Bidang	133.120	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
	28 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VI Kepulauan (ASN)	1 Bidang	356.280	Kepulauan
	29 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori I (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	173.700	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	30 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori II (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	152.700	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Kep.Bangka Belitung
	31 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori III (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	132.300	Sulbar, Sulsel, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
32	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	110.100	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
33	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori V (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	88.500	Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
34	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VI Kepulauan (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	258.900	Kepulauan
Sertipikat Redistribusi Tanah				
35	Sertipikat Redistribusi Tanah Kategori I	1 Bidang	1.025.467	Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat
36	Sertipikat Redistribusi Tanah Kategori II	1 Bidang	876.672	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Kep. Babel
37	Sertipikat Redistribusi Tanah Kategori III	1 Bidang	743.362	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulse, Gorontalo, Sulbar
38	Sertipikat Redistribusi Tanah Kategori IV	1 Bidang	598.897	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
39	Sertipikat Redistribusi Tanah Kategori V	1 Bidang	452.157	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten
40	Sertipikat Redistribusi Tanah Kategori VI	1 Bidang	1.389.097	Kepulauan
Bidang Tanah Yang Diinventarisasi				
41	Bidang Tanah yang Diinventarisasi Kategori I	1 Bidang	142.863	Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat
42	Bidang Tanah yang Diinventarisasi Kategori II	1 Bidang	123.315	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep. Bangka Belitung, Kepri
43	Bidang Tanah yang Diinventarisasi Kategori III	1 Bidang	117.300	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulse, Gorontalo, Sulbar
44	Bidang Tanah yang Diinventarisasi Kategori IV	1 Bidang	102.534	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
45	Bidang Tanah yang Diinventarisasi Kategori V	1 Bidang	100.405	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten
Neraca Penatagunaan Tanah				
46	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori I	1 Neraca	233.762.000	Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara
47	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori II	1 Neraca	184.171.000	NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sulse dan Sultra
48	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori III	1 Neraca	171.728.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kep. Bangka Belitung dan Lampung
49	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori IV	1 Neraca	185.583.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
50	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori I	1 Neraca	143.658.000	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara
51	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori II	1 Neraca	119.359.000	NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sulsel dan Sultra
52	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori III	1 Neraca	114.462.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kep.Babel, Lampung
53	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori IV	1 Neraca	120.473.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
Sertipikat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah				
54	Sertipikat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Bidang	1.553.240	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
55	Sertipikat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Bidang	1.271.160	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep.Babel, Kepri
56	Sertipikat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Bidang	1.129.480	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Sulbar
57	Sertipikat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Bidang	942.800	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
58	Sertipikat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Bidang	809.600	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten
Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah				
59	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Kecamatan	146.356.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
60	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Kecamatan	123.518.000	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep.Babel, Kepri
61	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Kecamatan	121.910.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Sulbar
62	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Kecamatan	115.576.000	Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
63	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Kecamatan	119.356.000	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten
Sertipikat BMN berupa Tanah dan Jalan Nasional				
64	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori I < 25.000 M ²	1 Bidang	1.643.000	Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat
65	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori II < 25.000 M ²	1 Bidang	1.388.000	Sulteng, Sultra, Sulut, NTB, Kepri, Kep. Bangka Belitung

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
66	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori III < 25.000 M ²)	1 Bidang	1.133.000	Aceh, Sumut, Sumbar,Kalsel, Kalbar, Kalteng,Kaltim, Sulsel,Gorontalo, Sulbar
67	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori IV < 25.000 M ²)	1 Bidang	863.000	Riau, Jambi, Sumsel,Bengkulu, Lampung
68	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori V < 25.000 M ²)	1 Bidang	593.000	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten, DKI Jakarta
69	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori I (25.000 s/d 100.000 M ²)	1 Bidang	3.406.000	Maluku, Maluku Utara, NTT,Papua, Papua Barat
70	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori II (25.000 s/d 100.000 M ²)	1 Bidang	2.862.000	Sulut,Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Kep.Bangka Belitung
71	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori III (25.000 s/d 100.000 M ²)	1 Bidang	2.318.000	Aceh, Sumut, Sumbar,Kalsel, Kalbar, Kalteng,Kaltim, Sulsel,Gorontalo, Sulbar
72	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori IV (25.000 s/d 100.000 M ²)	1 Bidang	1.742.000	Riau, Jambi, Sumsel,Bengkulu, Lampung
73	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori V (25.000 s/d 100.000 M ²)	1 Bidang	1.106.000	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten, DKI Jakarta
74	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori I (> 100.000 M ²)	1 Bidang	6.597.000	Maluku, Maluku Utara, NTT,Papua, Papua Barat
75	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori II (> 100.000 M ²)	1 Bidang	5.560.000	Sulut,Sulteng, Sultra, NTB, Kepri,Kep.Babel
76	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori III (> 100.000 M ²)	1 Bidang	4.523.000	Aceh, Sumut, Sumbar,Kalsel, Kalbar, Kalteng,Kaltim, Sulsel,Gorontalo, Sulbar
77	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori IV (> 100.000 M ²)	1 Bidang	3.425.000	Riau, Jambi, Sumsel,Bengkulu, Lampung
78	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Untuk Kategori V (> 100.000 M ²)	1 Bidang	2.327.000	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten, DKI Jakarta

Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (057)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
057.01	Perpustakaan Nasional SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Jumlah Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang dikonversi 1 Penjilidan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang dialihmediakan 2 Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno ke Bentuk Media Baru	27.385 Eksemplar 5.750 Eksemplar	1.202.660.000 328.388.000	

AS
\$

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
059.03	Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Jakarta			
	1 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.935.000	
	2 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	59.386.000	
	3 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.219.000	
	4 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	20.804.000	
	5 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	43.698.000	
	6 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.935.000	
	7 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	59.386.000	
	8 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.219.000	
	9 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.935.000	
	10 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	13.538.000	
	11 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	6.935.000	
	12 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	25.865.000	
	13 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	62.957.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Medan			
	14 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.622.000	
	15 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.216.000	
	16 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.712.000	
	17 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	35.168.000	
	18 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.625.000	
	19 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	21.080.000	
	20 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.810.000	
	21 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	10.291.000	
	22 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	22.121.000	
	23 Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	50.603.000	
	24 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio (Transportasi Udara)	1 Layanan	36.502.000	
	25 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	36.502.000	
	26 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.625.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Bandung			
	27 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.153.000	
	28 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	24.436.000	
	29 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	26.807.000	
	30 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	37.457.000	
	31 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.668.000	
	32 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	29.611.000	
	33 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.306.000	
	34 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	25.016.000	
	35 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	16.741.000	
	36 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	27.086.000	
	37 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	66.248.000	
	38 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	90.017.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Semarang			
	39 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.100.000	
	40 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.370.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
41	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara (Karimunjawa)	1 Layanan	26.556.000	
42	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	8.800.000	
43	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	31.394.000	
44	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara (Karimunjawa)	1 Layanan	29.506.000	
45	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.050.000	
46	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	21.320.000	
47	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.050.000	
48	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.320.000	
49	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara (Karimunjawa)	1 Layanan	26.556.000	
50	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	34.521.000	
51	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	65.410.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos, dan Informatika Balmon Kelas I Surabaya			
52	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.845.000	
53	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.575.000	
54	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	23.305.000	
55	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	82.055.000	
56	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	34.420.000	
57	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.950.000	
58	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	22.400.000	
59	Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	95.721.000	
60	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.845.000	
61	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.650.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Samarinda			
62	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.460.000	
63	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	26.186.000	
64	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	41.090.000	
65	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.256.000	
66	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.854.000	
67	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	61.448.000	
68	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.460.000	
69	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	26.186.000	
70	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	42.125.000	
71	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.256.000	
72	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.460.000	
73	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	26.186.000	
74	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat dan Laut	1 Layanan	11.038.000	
75	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	42.000.000	
76	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	11.038.000	
77	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	38.570.000	
78	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	72.064.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Makassar			
79	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.168.000	
80	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	25.650.000	
81	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	22.500.000	
82	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	17.080.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
83	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	70.360.000	
84	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.430.000	
85	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	24.050.000	
86	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	22.500.000	
87	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	24.050.000	
88	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	22.500.000	
89	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.168.000	
90	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	15.110.000	
91	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Makassar	1 Layanan	110.373.000	
92	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makasar Transportasi Laut	1 Layanan	74.600.000	
93	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	16.760.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Pekanbaru			
94	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
95	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.650.000	
96	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.500.000	
97	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	59.560.000	
98	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	25.390.000	
99	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.650.000	
100	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
101	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.650.000	
102	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	83.460.000	
103	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.130.000	
104	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	32.597.000	
105	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.606.000	
106	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos	1 Layanan	33.130.000	
107	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	88.470.000	
108	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	50.028.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Palembang			
109	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.434.000	
110	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.665.000	
111	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.862.000	
112	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	60.910.000	
113	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.434.000	
114	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	19.665.000	
115	Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.641.000	
116	Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	19.303.000	
117	Tidak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	25.090.000	
118	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	47.481.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Yogyakarta			
119	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I Yogyakarta)	1 Layanan	4.668.000	
120	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (D.I Yogyakarta)	1 Layanan	10.664.000	
121	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I. Yogyakarta)	1 Layanan	20.810.000	
122	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (D.I. Yogyakarta)	1 Layanan	35.569.000	
123	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota (D.I. Yogyakarta)	1 Layanan	3.974.000	
124	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota (D.I. Yogyakarta)	1 Layanan	8.094.000	
125	Pengukuran Frekuensi Radio (D.I. Yogyakarta)	1 Layanan	12.699.000	
126	Tindak Lanjut Hasil Penertiban (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	33.017.000	
127	Ujian Negara Amatir Radio (D.I. Yogyakarta)	1 Layanan	32.558.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Denpasar			
128	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.210.000	
129	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.426.000	
130	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	20.752.000	
131	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	79.157.000	
132	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.210.000	
133	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.426.000	
134	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.426.000	
135	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	60.537.000	
136	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	32.261.000	
137	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.411.000	
138	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.411.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Kupang			
139	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.831.000	
140	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	25.668.000	
141	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	41.861.000	
142	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	22.946.000	
143	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	34.217.000	
144	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	53.303.000	
145	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.107.000	
146	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	24.219.000	
147	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Isin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	41.861.000	
148	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.107.000	
149	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	24.219.000	
150	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	41.861.000	
151	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota Kupang	1 Layanan	10.764.000	
152	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.731.000	
153	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	28.478.000	
154	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	110.616.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Manado			
155	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.031.000	
156	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut	1 Layanan	27.674.000	
157	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	20.174.000	
158	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Sulut	1 Layanan	72.880.000	
159	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.031.000	
160	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Sulut	1 Layanan	31.288.000	
161	Pengukuran Frekuensi Radio Sulut	1 Layanan	27.074.000	
162	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	15.556.000	
163	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	38.296.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Jayapura			
164	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.660.000	
165	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	16.932.000	
166	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	65.862.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
167	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	63.934.000	
168	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	21.447.000	
169	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Papua)	1 Layanan	126.554.000	
170	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.660.000	
171	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	16.932.000	
172	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	65.810.000	
173	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	63.704.000	
174	Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.660.000	
175	Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota (Papua)	1 Layanan	59.372.000	
176	Tindak Lanjut Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.660.000	
177	Tindak Lanjut Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	65.732.000	
178	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	14.015.000	
179	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	53.841.000	
180	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	40.880.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Banda Aceh			
181	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota [Aceh]	1 Layanan	4.532.000	
182	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika diluar Kota [Aceh]	1 Layanan	22.491.000	
183	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika diluar Kota Menggunakan Transportasi Kapal Laut [Aceh]	1 Layanan	24.168.000	
184	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota [Aceh]	1 Layanan	21.331.000	
185	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [Aceh]	1 Layanan	49.692.000	
186	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota [Aceh]	1 Layanan	4.376.000	
187	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio diluar Kota [Aceh]	1 Layanan	32.550.000	
188	Pengukuran Frekuensi Radio didalam Kota	1 Layanan	4.533.000	
189	Pengukuran Frekuensi Radio diluar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.490.000	
190	Pengukuran Frekuensi Radio diluar Kota Dengan Menggunakan Transportasi Laut	1 Layanan	23.298.000	
191	Tindak Lanjut Hasil Penertiban didalam Kota [Aceh]	1 Layanan	11.728.000	
192	Tindak Lanjut Hasil Penertiban diluar Kota [Aceh]	1 Layanan	37.090.000	
193	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Banda Aceh	1 Layanan	36.119.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Batam			
194	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.788.000	
195	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	18.998.000	
196	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	35.248.000	
197	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	27.820.000	
198	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	63.498.000	
199	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.175.000	
200	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	23.998.000	
201	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	35.248.000	
202	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.180.000	
203	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	18.998.000	
204	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	35.248.000	
205	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	35.643.000	
206	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	37.416.000	
207	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	63.509.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Padang			
208	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.606.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
209	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.272.000	
210	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	1 Layanan	38.036.000	
211	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	13.170.000	
212	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	31.135.000	
213	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.182.000	
214	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	19.691.000	
215	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Transportasi Laut	1 Layanan	38.036.000	
216	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.606.000	
217	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.994.000	
218	Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Laut	1 Layanan	38.036.000	
219	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	31.079.000	
220	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	13.745.000	
221	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	27.562.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Jambi			
222	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.403.000	
223	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.390.000	
224	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.046.000	
225	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	43.679.000	
226	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.434.000	
227	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	19.820.000	
228	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	20.234.000	
229	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.632.000	
230	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	64.263.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Bengkulu			
231	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
232	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.630.000	
233	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu	1 Layanan	24.985.000	
234	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	13.652.000	
235	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	42.130.000	
236	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Bengkulu	1 Layanan	8.800.000	
237	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
238	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.630.000	
239	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
240	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.630.000	
241	Ujian Amatir Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	52.800.000	
242	Ujian Amatir Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	33.430.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Lampung			
243	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.658.000	
244	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
245	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	11.350.000	
246	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	29.526.000	
247	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.987.000	
248	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
249	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
250	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
251	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	3.480.000	
252	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	6.434.000	
253	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	27.666.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pontianak			
254	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.117.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
255	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.383.000	
256	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	35.754.000	
257	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	25.311.000	
258	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	64.403.000	
259	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.117.000	
260	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.383.000	
261	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	24.388.000	
262	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.072.000	
263	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.383.000	
264	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	35.754.000	
265	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	11.033.000	
266	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	61.119.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Banjarmasin			
267	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
268	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.025.000	
269	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.525.000	
270	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	42.700.000	
271	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.230.000	
272	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	21.920.000	
273	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	21.920.000	
274	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	19.030.000	
275	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	59.050.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palangkaraya			
276	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.410.000	
277	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.460.000	
278	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.216.000	
279	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	74.241.000	
280	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.405.000	
281	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	22.958.000	
282	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.269.000	
283	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.977.000	
284	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio	1 Layanan	5.486.000	
285	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	81.242.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Mataram			
286	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota [NTB]	1 Layanan	5.775.000	
287	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Darat	1 Layanan	22.450.000	
288	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	23.625.000	
289	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	14.620.000	
290	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Udara	1 Layanan	37.660.000	
291	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota [NTB]	1 Layanan	19.080.000	
292	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Darat	1 Layanan	57.338.000	
293	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	60.315.000	
294	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Udara	1 Layanan	84.982.000	
295	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota [NTB]	1 Layanan	5.775.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
296	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Darat	1 Layanan	22.450.000	
297	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	23.625.000	
298	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	14.620.000	
299	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Udara	1 Layanan	37.660.000	
300	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota [NTB]	1 Layanan	5.950.000	
301	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Darat	1 Layanan	22.450.000	
302	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	23.625.000	
303	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	14.620.000	
304	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Udara	1 Layanan	37.660.000	
305	Tindak Lanjut Hasil Penertiban [NTB]	1 Layanan	50.545.000	
306	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok [NTB]	1 Layanan	58.010.000	
307	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa [NTB]	1 Layanan	63.460.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palu			
308	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 dokumen	5.510.000	
309	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 dokumen	23.905.000	
310	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 dokumen	30.560.000	
311	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 dokumen	67.290.000	
312	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 dokumen	5.510.000	
313	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 dokumen	21.973.000	
314	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 dokumen	30.119.000	
315	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 dokumen	5.096.000	
316	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 dokumen	23.857.000	
317	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 dokumen	30.558.000	
318	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 dokumen	42.746.000	
319	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 dokumen	79.718.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Kendari			
320	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.314.000	
321	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	22.615.000	
322	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	24.271.000	
323	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	34.414.000	
324	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	31.164.000	
325	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	41.830.000	
326	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.314.000	
327	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	21.500.000	
328	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	27.769.000	
329	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	34.776.000	
330	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.314.000	
331	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	22.615.000	
332	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	24.685.000	
333	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	32.290.000	
334	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	14.676.000	
335	Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	56.956.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Merauke			
336	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	7.711.000	
337	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	52.205.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
338	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	37.985.000	
339	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	115.578.000	
340	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.611.000	
341	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	50.353.000	
342	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.353.000	
343	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	50.421.000	
344	Ujian Negara Amatir Radio Dalam	1 Layanan	39.700.000	
345	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	97.500.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Ambon			
346	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.472.000	
347	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	25.569.000	
348	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	23.137.000	
349	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	18.530.000	
350	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	29.150.000	
351	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	41.038.000	
352	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.497.000	
353	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	24.778.000	
354	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	22.880.000	
355	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.400.000	
356	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	12.870.000	
357	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	22.871.000	
358	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.012.000	
359	Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	19.550.000	
360	Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	38.500.000	
361	Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	50.253.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Ternate			
362	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.650.000	
363	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.950.000	
364	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.160.000	
365	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Pulau Terluar	1 Layanan	44.200.000	
366	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.640.000	
367	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	61.520.000	
368	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	69.690.000	
369	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.930.000	
370	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.030.000	
371	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.160.000	
372	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.850.000	
373	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.470.000	
374	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.160.000	
375	Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	22.920.000	
376	Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	44.310.000	
377	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio	1 Layanan	8.550.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Pangkal Pinang			
378	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.160.000	
379	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	17.430.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
380	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	24.400.000	
381	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.160.000	
382	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	17.430.000	
383	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	24.400.000	
384	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.160.000	
385	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	17.430.000	
386	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	24.400.000	
387	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	7.840.000	
388	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	20.190.000	
389	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	23.400.000	
390	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	9.190.000	
391	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Gorontalo	1 Layanan	41.410.000	
392	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
393	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
394	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	20.960.000	
395	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	69.110.000	
396	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
397	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
398	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
399	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
400	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	5.590.000	
401	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	21.810.000	
402	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	23.150.000	
403	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Tangerang	1 Layanan	39.740.000	
404	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.050.000	
405	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.650.000	
406	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.151.000	
407	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	58.416.000	
408	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.250.000	
409	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	20.450.000	
410	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.010.000	
411	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.522.000	
412	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.526.000	
413	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	48.500.000	
414	Ujian Negara Amatir Dalam Kota Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Manokwari	1 Layanan	20.607.000	
415	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.360.000	
416	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	39.297.000	
417	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	50.356.000	
418	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	50.797.000	
419	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.830.000	
420	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.360.000	
421	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	49.297.000	
422	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	39.297.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
423	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	50.797.000	
424	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.700.000	
425	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	50.797.000	
426	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	39.297.000	
427	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	50.797.000	
428	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	39.230.000	
429	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Mamuju	1 Layanan	12.627.000	
430	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.330.000	
431	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	23.598.000	
432	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	24.225.000	
433	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	60.392.000	
434	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.330.000	
435	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	23.546.000	
436	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.330.000	
437	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	23.546.000	
438	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	7.556.000	
439	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	35.387.000	
440	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Mamuju Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta	1 Layanan	58.985.000	
441	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.935.000	
442	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Kordinasi Hasil Gangguan)	1 Layanan	9.946.000	
443	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi) Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Medan	1 Layanan	13.103.000	
444	Layanan Penyelesaian Gangguan Dalam Kota	1 Layanan	4.615.000	
445	Layanan Penyelesaian Gangguan Luar Kota Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Bandung	1 Layanan	21.737.000	
446	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.380.000	
447	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Semarang	1 Layanan	20.505.000	
448	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.100.000	
449	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Surabaya	1 Layanan	21.320.000	
450	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	7.170.000	
451	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Samarinda	1 Layanan	22.645.000	
452	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.460.000	
453	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	26.186.000	
454	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	42.125.000	
455	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Makassar	1 Layanan	28.256.000	
456	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Pekanbaru	1 Layanan	22.500.000	
457	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
458	Penanganan Gangguan Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.493.000	
459	Penanganan Gangguan Luar Kota Transportasi Laut Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Palembang	1 Layanan	33.130.000	
460	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.434.000	
461	Penanganan Gangguan Luar Kota Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Yogyakarta	1 Layanan	19.665.000	
462	Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Yogyakarta Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Denpasar	1 Layanan	14.592.000	
463	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.210.000	
464	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.251.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Kupang			
465	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.107.000	
466	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.219.000	
467	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	41.861.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Manado			
468	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Sulawesi Utara	1 Layanan	21.937.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jayapura			
469	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.660.000	
470	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	56.980.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh			
471	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	4.533.000	
472	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.490.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Batam			
473	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.180.000	
474	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.998.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Padang			
475	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.606.000	
476	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.994.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jambi			
477	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	20.027.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Bengkulu			
478	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
479	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.630.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Lampung			
480	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
481	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pontianak			
482	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.117.000	
483	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.383.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banjarmasin			
484	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
485	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.920.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palangkaraya			
486	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.165.000	
487	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.870.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Mataram			
488	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	5.950.000	
489	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB)	1 Layanan	23.625.000	
490	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB) Transportasi Udara	1 Layanan	37.660.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palu			
491	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.510.000	
492	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.480.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari			
493	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.314.000	
494	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.615.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Merauke			
495	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.042.000	
496	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	48.697.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari			
497	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.866.000	
498	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	50.356.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju			
499	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.330.000	
500	Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	23.546.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon			
501	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.253.000	
502	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	17.972.000	
503	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	24.926.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate			
504	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.976.000	
505	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.358.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal Pinang			
506	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.160.000	
507	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	17.430.000	
508	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1 Layanan	22.960.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo			
509	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
510	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Tangerang			
511	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.975.000	
512	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.450.000	
	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Tanjung Selor			
513	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
514	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	28.430.000	
515	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	34.830.000	
516	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	23.150.000	
517	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	72.590.000	
518	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
519	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	28.430.000	
520	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	34.130.000	
521	Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
522	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Transportasi Darat	1 Layanan	28.430.000	
523	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Transportasi Laut	1 Layanan	34.130.000	
524	Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Dalam Kota	1 Layanan	15.490.000	
525	Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Luar Kota	1 Layanan	55.032.000	
526	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	45.901.000	
527	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	85.381.000	
	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tanjung Selor			
528	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
529	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	34.130.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Dokumen Analisa Intelijen Obat dan Makanan	1 Dokumen	63.750.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di DKI Jakarta			
	2 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jakarta	1 Perkara	74.520.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Barat			
	3 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Bandung	1 Perkara	94.740.000	
	4 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tasikmalaya	1 Perkara	83.660.000	
	5 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Bogor	1 Perkara	83.660.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Tengah			
	6 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Semarang	1 Perkara	89.110.000	
	7 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Banyumas	1 Perkara	79.740.000	
	8 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	1 Perkara	79.740.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di D.I. Yogyakarta			
	9 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Yogyakarta	1 Perkara	94.480.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Timur			
	10 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Surabaya	1 Perkara	95.710.000	
	11 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Kediri	1 Perkara	85.280.000	
	12 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Jember	1 Perkara	85.280.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Aceh			
	13 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Aceh	1 Perkara	91.530.000	
	14 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Tengah	1 Perkara	81.570.000	
	15 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Selatan	1 Perkara	81.570.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sumatera Utara			
	16 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Medan	1 Perkara	88.280.000	
	17 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Toba Samosir	1 Perkara	80.881.000	
	18 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungbalai	1 Perkara	77.770.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sumatera Barat			
	19 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Padang	1 Perkara	92.760.000	
	20 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Payakumbuh	1 Perkara	81.740.000	
	21 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Dharmasraya	1 Perkara	81.740.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Riau			
	22 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Pekanbaru	1 Perkara	94.380.000	
	23 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Dumai	1 Perkara	82.950.000	
	24 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Indragiri Hilir	1 Perkara	82.950.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jambi			
	25 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Jambi	1 Perkara	89.120.000	
	26 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Sungai Penuh	1 Perkara	79.140.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sumatera Selatan			
27	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Palembang	1 Perkara	89.420.000	
28	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Lubuklinggau	1 Perkara	79.340.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Lampung			
29	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Bandar Lampung	1 Perkara	84.820.000	
30	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	1 Perkara	76.710.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat			
31	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Pontianak	1 Perkara	94.860.000	
32	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sanggau	1 Perkara	82.650.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah			
33	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Palangka Raya	1 Perkara	92.490.000	
34	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Perkara	83.240.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan			
35	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banjarmasin	1 Perkara	87.360.000	
36	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Perkara	77.840.000	
37	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu	1 Perkara	77.840.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Timur			
38	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Samarinda	1 Perkara	130.460.000	
39	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Balikpapan	1 Perkara	109.640.000	
40	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tarakan	1 Perkara	109.640.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Utara			
41	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Manado	1 Perkara	89.680.000	
42	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe	1 Perkara	79.190.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Tengah			
43	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Palu	1 Perkara	91.200.000	
44	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Banggai	1 Perkara	80.330.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan			
45	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar	1 Perkara	93.488.000	
46	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Palopo	1 Perkara	82.038.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Tenggara			
47	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Kendari	1 Perkara	94.600.000	
48	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Baubau	1 Perkara	82.970.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Maluku			
49	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Ambon	1 Perkara	163.954.000	
50	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1 Perkara	124.839.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Bali			
51	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Denpasar	1 Perkara	100.916.000	
52	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Buleleng	1 Perkara	88.586.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Nusa Tenggara Barat			
53	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Mataram	1 Perkara	97.148.000	
54	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Bima	1 Perkara	85.708.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Nusa Tenggara Timur			
55	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Kupang	1 Perkara	97.632.000	
56	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Ende	1 Perkara	83.922.000	
57	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1 Perkara	83.922.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Papua			
58	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jayapura	1 Perkara	179.840.000	
59	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Merauke	1 Perkara	161.335.000	
60	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Mimika	1 Perkara	149.040.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Bengkulu			
61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Bengkulu	1 Perkara	87.510.000	
62	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Rejang Lebong	1 Perkara	77.170.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Maluku Utara			
63	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Sofifi	1 Perkara	99.070.000	
64	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Pulau Morotai	1 Perkara	85.810.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Banten			
65	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Serang	1 Perkara	95.140.000	
66	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Tangerang	1 Perkara	80.700.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Bangka Belitung			
67	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Pangkal Pinang	1 Perkara	92.960.000	
68	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung	1 Perkara	81.970.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Gorontalo			
69	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Gorontalo	1 Perkara	92.072.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau			
70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Batam	1 Perkara	116.060.000	
71	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	1 Perkara	98.090.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Papua Barat			
72	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Manokwari	1 Perkara	167.140.000	
73	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	1 Perkara	141.120.000	
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Barat			
74	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Mamuju	1 Perkara	87.130.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	Badan Narkotika Nasional			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Laporan	280.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional			
	2 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	37.272.300	
	3 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	16.818.900	
	4 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	8.655.575	
	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah			
	5 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	29.699.666	
	6 Program Rehabilitasi Layanan 6 Bulan	1 Orang	16.480.065	
	7 Program Rehabilitasi Populasi Khusus 3 Bulan	1 Orang	8.801.970	
	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka			
	8 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	32.718.666	
	9 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	17.234.079	
	10 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	9.126.904	
	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam			
	11 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	28.092.500	
	12 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	14.194.181	
	13 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	8.568.250	
	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda			
	14 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	25.635.166	
	15 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	13.917.600	
	16 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	6.950.189	
	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Deli			
	17 Layanan Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	28.502.000	
	18 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	15.709.375	
	19 Layanan Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	7.034.625	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi			
	1 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Balai 5 Hari	1 Orang	4.343.566	
	2 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Balai 6 Hari	1 Orang	4.778.733	
	3 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Balai 7 Hari	1 Orang	5.427.700	
	4 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	5.104.533	
	5 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	5.628.533	
	6 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	6.252.533	
	7 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	6.175.866	
	8 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	6.699.866	
	9 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBPLM Jakarta di Lokasi Jangkauan Udara 7 Hari	1 Orang	7.323.866	
	10 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Balai 5 Hari	1 Orang	4.246.966	
	11 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Balai 6 Hari	1 Orang	4.719.133	
	12 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Balai 7 Hari	1 Orang	5.246.800	
	13 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	4.897.833	
	14 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	5.563.500	
	15 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BBLM Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	6.299.300	
	16 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Balai 5 Hari	1 Orang	4.158.100	
	17 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Balai 6 Hari	1 Orang	4.307.433	
	18 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Balai 7 Hari	1 Orang	4.635.100	
	19 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	5.115.833	
	20 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	5.622.500	
	21 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	6.129.166	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	22 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	5.512.700	
	23 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	6.019.366	
	24 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Makassar di Lokasi Jangkauan Udara 7 Hari	1 Orang	6.526.033	
	25 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Balai 5 Hari	1 Orang	5.603.333	
	26 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Balai 6 Hari	1 Orang	5.947.333	
	27 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Balai 7 Hari	1 Orang	6.591.333	
	28 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	5.244.666	
	29 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	5.758.666	
	30 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	6.572.666	
	31 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	7.081.200	
	32 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	7.601.866	
	33 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara 7 Hari	1 Orang	8.422.533	
	34 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Balai 5 Hari	1 Orang	5.041.366	
	35 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Balai 6 Hari	1 Orang	5.474.300	
	36 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Balai 7 Hari	1 Orang	5.478.833	
	37 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	7.493.900	
	38 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	8.160.566	
	39 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	8.909.600	
	40 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	8.102.866	
	41 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	8.883.066	
	42 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara 7 Hari	1 Orang	9.663.266	
	43 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Balai 5 Hari	1 Orang	5.247.766	
	44 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Balai 6 Hari	1 Orang	5.527.933	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	45 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Balai 7 Hari	1 Orang	6.402.666	
	46 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	6.601.000	
	47 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	6.183.666	
	48 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	6.767.666	
	49 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	5.581.333	
	50 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	6.157.833	
	51 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara 7 Hari	1 Orang	6.701.000	
	52 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Balai 5 Hari	1 Orang	5.492.566	
	53 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Balai 6 Hari	1 Orang	5.987.333	
	54 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Balai 7 Hari	1 Orang	6.442.100	
	55 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	7.985.466	
	56 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	8.945.000	
	57 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	9.894.533	
	58 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	10.499.666	
	59 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	11.559.200	
	60 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Ambon di Lokasi Jangkauan Udara 7 Hari	1 Orang	12.463.200	
	61 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat 5 Hari	1 Orang	9.283.866	
	62 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari	1 Orang	10.490.800	
	63 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat 7 Hari	1 Orang	11.613.800	
	64 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara 5 Hari	1 Orang	11.664.466	
	65 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara 6 Hari	1 Orang	12.787.466	
	66 Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BLM Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara 7 Hari	1 Orang	13.910.466	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Informasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu 1 Informasi Tanda Waktu	1 Informasi	299.980.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
080.01	Badan Tenaga Nuklir Nasional SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Laporan Data Dosis Radiasi Eksternal dan Data Dosis Radiasi Internal yang Diterima Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong	1 Laporan	123.455.000	
	2 Laporan Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong	1 Laporan	138.446.000	
	3 Laporan Hasil Uji Profisiensi Laboratorium di BATAN untuk Pengukuran Radiasi Gamma	1 Laporan	217.408.000	
	4 Laporan Pemantauan Tingkat Radioaktivitas Air Hujan di Wilayah Indonesia	1 Laporan	248.890.000	
	5 Laporan Hasil Pengelolaan Limbah Radioaktif, Limbah B3, dan Bahan Bakar Nuklir Bekas	3 Laporan	1.192.745.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (081)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
081.01	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Jasa Teknologi Polimer (PNBP) 1 Audit Internal Sistem Mutu Jasa Pelatihan Teknologi Polimer (PNBP) 2 Layanan Jasa Pelatihan Teknologi Polimer (PNBP) Jasa Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi (PNBP) 3 Audit Internal Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Layanan Pembinaan Nasional Jabatan Fungsional Perakayasa Dan Teknisi Litkayasa 4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perakayasa Tingkat Pusat	1 Jasa Teknologi 14 Jasa Pelatihan Teknologi 1 Jasa Teknologi 1 Laporan	41.915.000 284.620.000 41.915.000 380.736.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
082.01	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)			
	1 Data Penginderaan Jauh Terproduksi Hasil Akuisisi	25.018 Data	736.280.000	
	2 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Sumedang)	37 GB	90.400.000	
	3 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Pasuruan)	94 GB	100.900.000	
	4 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Pontianak)	145 GB	106.000.000	
	5 Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Agam)	461 GB	188.458.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Standardisasi Nasional (084)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
084.01	Badan Standardisasi Nasional			
	SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)			
	Standar Nasional Indonesia (SNI)			
	1 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	99.060.000	
	2 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	99.060.000	
	3 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	99.060.000	
	4 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	99.060.000	
	5 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	99.060.000	
	6 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	104.135.000	
	7 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	104.135.000	
	8 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	104.135.000	
	9 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	104.135.000	
	10 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	104.135.000	
	11 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	265.340.000	
	12 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	360.840.000	
	13 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	528.880.000	
	14 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	626.780.000	
	15 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	735.550.000	
	16 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	850.670.000	
	17 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.012.590.000	
	18 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.112.790.000	
	19 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.285.430.000	
	20 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.385.630.000	
	21 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	388.825.000	
	22 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	488.295.000	
	23 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	649.235.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
24	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	753.435.000	
25	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	841.935.000	
26	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	958.625.000	
27	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.100.275.000	
28	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.194.260.000	
29	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.344.230.000	
30	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.432.730.000	
31	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	390.340.000	
32	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	485.840.000	
33	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	653.880.000	
34	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	751.780.000	
35	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	860.550.000	
36	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	975.670.000	
37	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.137.590.000	
38	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.237.790.000	
39	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.410.430.000	
40	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.510.630.000	
41	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	
42	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	49.500.000	
43	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	
44	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	
	Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi			
45	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	99.060.000	
46	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	99.060.000	
47	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	99.060.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Standardisasi Nasional (084)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
48	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	99.060.000	
49	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	99.060.000	
50	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	104.135.000	
51	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	104.135.000	
52	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	104.135.000	
53	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	104.135.000	
54	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	104.135.000	
55	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	265.340.000	
56	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	360.840.000	
57	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	528.880.000	
58	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	626.780.000	
59	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	735.550.000	
60	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	850.670.000	
61	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.012.590.000	
62	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.112.790.000	
63	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.285.430.000	
64	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.385.630.000	
65	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	388.825.000	
66	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	488.295.000	
67	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	649.235.000	
68	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	753.435.000	
69	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	841.935.000	
70	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	958.625.000	
71	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.100.275.000	
72	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.194.260.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
73	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.344.230.000	
74	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.432.730.000	
75	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	390.340.000	
76	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	485.840.000	
77	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	653.880.000	
78	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	751.780.000	
79	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	860.550.000	
80	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	975.670.000	
81	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.137.590.000	
82	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.237.790.000	
83	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.410.430.000	
84	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.510.630.000	
85	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	
86	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	49.500.000	
87	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	
88	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	
	Standar Nasional Indonesia Bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif			
89	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	99.060.000	
90	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	99.060.000	
91	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	99.060.000	
92	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	99.060.000	
93	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	99.060.000	
94	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	104.135.000	
95	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	104.135.000	
96	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Publikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	104.135.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Standardisasi Nasional (084)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
97	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	104.135.000	
98	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - <i>Reprint</i> Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	104.135.000	
99	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	265.340.000	
100	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	360.840.000	
101	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	528.880.000	
102	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	626.780.000	
103	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	735.550.000	
104	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	850.670.000	
105	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.012.590.000	
106	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.112.790.000	
107	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.285.430.000	
108	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.385.630.000	
109	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	388.825.000	
110	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	488.295.000	
111	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	649.235.000	
112	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	753.435.000	
113	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	841.935.000	
114	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	958.625.000	
115	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.100.275.000	
116	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.194.260.000	
117	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.344.230.000	
118	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.432.730.000	
119	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1 SNI	390.340.000	
120	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 31 s.d. 60	1 SNI	485.840.000	
121	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 61 s.d. 90	1 SNI	653.880.000	

AGW
6

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Standardisasi Nasional (084)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	122 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 91 s.d. 130	1 SNI	751.780.000	
	123 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 131 s.d. 170	1 SNI	860.550.000	
	124 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 171 s.d. 210	1 SNI	975.670.000	
	125 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 211 s.d. 250	1 SNI	1.137.590.000	
	126 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 251 s.d. 300	1 SNI	1.237.790.000	
	127 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 301 s.d. 350	1 SNI	1.410.430.000	
	128 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 351 s.d. 400	1 SNI	1.510.630.000	
	129 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	
	130 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - Reprint dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	49.500.000	
	131 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	
	132 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1 SNI	135.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara (086)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
086.01	Lembaga Administrasi Negara SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Pelatihan Teknis dan Sosial Kultural			
	1 Pelatihan MOT Berbasis <i>E-Learning</i>	1 Penyelenggaraan	62.000.000	
	2 Pelatihan TOC Berbasis <i>E-Learning</i>	1 Penyelenggaraan	64.000.000	
	3 Pelatihan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi Berbasis <i>E-Learning</i>	1 Penyelenggaraan	39.790.000	
	4 Pelatihan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Berbasis <i>E-Learning</i>	1 Penyelenggaraan	46.040.000	
	5 Pelatihan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan Berbasis <i>E-Learning</i>	1 Penyelenggaraan	44.240.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Rekomendasi Hasil Pembinaan APIP Pemda			
	1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 LHP	32.665.000	
	2 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 LHP	31.475.000	
	3 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 LHP	34.745.000	
	4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 LHP	40.900.000	
	5 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 LHP	31.325.000	
	6 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 LHP	35.215.000	
	7 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 LHP	40.375.000	
	8 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 LHP	28.900.000	
	9 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 LHP	25.560.000	
	10 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 LHP	33.130.000	
	11 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 LHP	29.425.000	
	12 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 LHP	40.645.000	
	13 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 LHP	34.755.000	
	14 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 LHP	32.700.000	
	15 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHP	34.730.000	
	16 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHP	33.275.000	
	17 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 LHP	47.580.000	
	18 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 LHP	34.940.000	
	19 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHP	42.620.000	
	20 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHP	38.320.000	
	21 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHP	35.255.000	
	22 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 LHP	41.275.000	
	23 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTB	1 LHP	43.390.000	
	24 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 LHP	34.510.000	
	25 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 LHP	44.680.000	
	26 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua	1 LHP	61.270.000	
	27 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 LHP	51.280.000	
	28 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 LHP	35.325.000	
	29 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 LHP	38.500.000	
	30 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 LHP	34.070.000	
	31 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 LHP	39.135.000	
	32 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 LHP	35.765.000	
	33 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 LHP	39.215.000	
	34 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	47.580.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Sertifikasi			
	1 Sertifikasi Produk Tipe 5 Perusahaan Dalam Negeri	1 Sertifikat	10.191.000	Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Perdagangan (evaluasi lapangan) telah menerima uang harian dari wajib bayar sesuai Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif PNBPN Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan, maka tidak diberikan lagi belanja jasa lainnya/jasa profesi
	2 Sertifikasi Produk Tipe 5 Perusahaan Luar Negeri	1 Sertifikat	20.799.000	
	3 Sertifikasi Produk Tipe 1 Perusahaan Dalam Negeri	1 Sertifikat	1.760.000	
	4 Sertifikasi Produk Tipe 1 Perusahaan Luar Negeri	1 Sertifikat	3.808.000	
	5 Layanan Sertifikasi Person	1 Sertifikat	677.000	
	6 Layanan Sertifikasi Bimbingan Teknis	1 Sertifikat	3.272.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (106)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah			
	1 Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah di LKPP	108 Penyelenggaraan	37.036.000	
	2 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah di Daerah	12 Penyelenggaraan	341.086.000	
	3 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah berbasis Kompetensi Jabatan Fungsional	17 Penyelenggaraan	759.982.000	
	4 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah berbasis Kompetensi Non Jabatan Fungsional	20 Penyelenggaraan	683.526.000	
	5 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah berbasis Kompetensi <i>Inpassing</i>	12 Penyelenggaraan	183.370.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
116.01	Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Program, Produksi, dan Pengembangan Siaran Internasional			
	1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	3.750.000	
	2 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	835.000	
	3 Program Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	710.000	
	4 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.782.000	
	5 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	481.000	
	6 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.560.000	
	7 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	350.000	
	8 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	550.000	
	Program, Produksi, dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional, dan Nasional			
	9 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	1.143.000	
	10 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	4.642.000	
	11 Program Produksi SPOT	1 Paket Acara	183.000	
	12 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	822.000	
	13 Program Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	630.000	
	14 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	938.000	
	15 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.792.000	
	16 Program Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	878.000	
	17 Program Siaran KUIS	1 Paket Acara	383.000	
	18 Program Produksi Sandiwara Radio	1 Paket Acara	1.716.000	
	19 Program Siaran Pergelaran	1 Paket Acara	13.688.000	
	20 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	432.000	
	21 Program Produksi Dokumenter	1 Paket Acara	1.362.000	
	22 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.454.000	
	23 Program Siaran Obrolan	1 Paket Acara	440.000	
	24 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	311.000	
	25 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket Acara	77.000	
	26 Program Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Paket Acara	2.833.000	
	27 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	551.000	
	Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan			
	28 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	4.373.000	
	29 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	5.822.000	
	30 Program Produksi SPOT	1 Paket Acara	482.000	
	31 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	821.000	
	32 Program Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	629.000	
	33 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	926.000	
	34 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.790.000	
	35 Program Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	879.000	
	36 Program Siaran KUIS	1 Paket Acara	383.000	
	37 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	881.000	
	38 Program Produksi Dokumenter	1 Paket Acara	1.361.000	
	39 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.402.000	
	40 Program Siaran Obrolan	1 Paket Acara	440.000	
	41 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	314.000	
	42 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket Acara	76.000	
	43 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	553.000	
	44 Program Siaran Adlibs	1 Paket Acara	139.000	
	45 Program Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Paket Acara	4.751.000	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

